



**LAPORAN EVALUASI
HASIL RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TRIWULAN IV**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN
2022**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun Renja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai langkah nyata penerapan membuat anggaran Dinas Kesehatan.

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Renja 2022 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui pelbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Didalam rencana kerja ini evaluasi pencapaian program Tahun 2020 dan perkiraan kegiatan Tahun 2023 dengan sasaran dan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan ini disusun dalam membuat anggaran yang menjadi komitmen kami untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Pangkalan Bun, 5 Januari 2022

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ARIF SUSANTO,SKM.M.Si
NIP.19721216 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penyajian Laporan
Bab II	Perencanaan Pembangunan
	2.1 Visi dan Misi
	2.2. Tujuan dan Sasaran
	2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022
Bab III	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja
	3.1 Capaian Kinerja Sasaran (tambahan penjelasan perbandingan target tahunan terhadap target akhir RENSTRA).
	3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
	3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan.
	3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat Daerah
	3.5. Capaian Kinerja Pelaksanaan SPM (Bagi Perangkat Daerah yang Mampu SPM)
Bab IV	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
	4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat
	4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya
Bab V	Penutup
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan: a. Persiapan Penyusunan b. Penyusunan rancangan awal c. Penyusunan rancangan d. Perumusan rancangan akhir e. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2022. Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan. Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 maret 2022. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dan 2024.

Evaluasi terhadap hasil rencana kerja mencakup program dan kegiatan, indicator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dilaksanakannya evaluasi hasil rencana kerja triwulan II tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi hasil rencana kerja dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran renstra Dinas Kesehatan serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun tujuan dari Evaluasi hasil rencana kerja adalah :

1. Mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja
2. Mengetahui realisasi penyerapan dana
3. Mengetahui kendala yang dihadapi

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan evaluasi hasil rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyajian Laporan

- BAB II : Perencanaan Pembangunan, menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022
- BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja, menjelaskan tentang capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan/sub kegiatan, rekapitulasi evaluasi terhadap rencana kerja perangkat daerah
- BAB IV : Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian kinerja, menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat, serta tindak lanjut bagi pelaksanaan berikutnya
- BAB V : Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 VISI DAN MISI

Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 dalam memimpin Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki visi Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan organisasi dinas kesehatan dalam menjalankan misi kedua bupati dan wakil bupati terpilih sebagaimana tercantum dalam rencana strategis (perubahan) dinas kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan turut mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Indikator dan target tujuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Indikator dan Target Tujuan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Periode 2018 – 2022

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup	80 %	85 %	85 %	90 %	95 %
2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan sebagaimana di atas adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan upaya kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya Kesehatan.
5. Tersedianya kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Indikator dan target dari setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Indikator dan Target Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Periode 2018 – 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya status kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu	200	160	140	120	100
		Angka Kematian Bayi	24	24	22	20	18
		Prevalensi Stunting	28 %	27 %	27 %	26 %	25 %
		Persentase Desa/Kel Siaga	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi HIV	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Cakupan Imunisasi dasar Lengkap	80 %	93 %	93 %	95 %	95 %
		Cakupan Desa/Kel KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	83 %	83 %	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Perlindungan Finansial, Ketersediaan Obat dan sumber daya kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai	80%	85%	85%	90%	95%
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	1: 16000	1: 16000	1: 16000	1: 16000	1: 16000
		Persentase Penduduk Miskin yang Terlayani di Fasilitas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Sembilan jenis tenaga di Puskesmas sesuai dengan Standar Kompetensi	80%	85%	85%	90%	95%
5	Tersedianya kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun anggaran 2022 Dinas Kesehatan sebagaimana dimuat dalam DPA melaksanakan 5 program, 21 kegiatan dan 584 subkegiatan.

Tabel Target dan Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	2022
I	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Pratama	100
		Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	50
		Persentase Pustu/Poskesdes/Polindes yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	50
		Persentase pengadaan alat Kesehatan Rumah Sakit yang sesuai standar	100
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan di Puskesmas melalui proses penyediaan, distribusi dan monev	100
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
		Persentase pelayanan kesehatan balita	100
		Persentase pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar	100
		Persentase pelayanan kesehatan usia produktif	100
		Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut	100
		Persentase pelayanan Kesehatan orang penderita hipertensi	100
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100
		Persentase pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	
		Persentase pelayanan TB Paru	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan (HIV-AIDS)	100
		Persentase Desa/kelurahan UCI	100
		Persentase Desa/kelurahan yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dlm penanggulangan kedaruratan Kesehatan masyarakat yg berpotensi wabah	100
		Persentase pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	100
		Persentase Desa/Kelurahan mendukung Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	55
		Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	100
		Persentase peningkatan kapasitas laboratorium Kesehatan daerah	90
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya yang sesuai standar	

	Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		
1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	7
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Kesehatan lasannya yang di bangun	4
3	Pembangunan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	2
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Gedung puskesmas yang direhabilitasi	2
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung fasilitas Kesehatan lainnya	9
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan	3
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan Puskesmas yang diadakan	18
8	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah dan jenis pengadaan bahan habis pakai	1
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan dikalibrasi	76
B	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis pelayanan UKM dan UKP Rujukan yang diberikan	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	4.750
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan	4.534
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.318
4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan	18.939
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	46.948
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	8

7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	18.468
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	9
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	8
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	9
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus TBC yang ditangani	400
		Jumlah penemuan kasus suspek teduga TBC	4.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kasus HIV-AIDS yang diobati	120
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang diperiksa	8429
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi capaian indicator [program surveilns	18
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita yang mendapat penanganan gizi kurang dan gizi buruk	5
		Jumlah Puskesmas yang mendapat fasoilitas	18
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan dan monitoring evaluasi	6
		Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan dan monitoring evaluasi	18
		Jumlah sosialisasi dan pembinaan GP2SP	2
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengeola limbah medis dengan aman	20
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan Monev program kesehatan lingkungan	18
		Jumlah TPP dan TFU yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai standar	6
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat	2
		waktu penyediaan promosi kesehatan melalui media radio lokal	6
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	18

	Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan teknis surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	18
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	4
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	9
22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	145
23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah capaian pengobatan massal kecacingan	59.860
		jumlah deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	5488
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang belum mendapat jaminan Kesehatan (Universal Health Coverage)	50000
		Jumlah peserta iuran PBPU Pemda	50000
		Waktu bantuan iuran PBPU mandiri Kelas III yang aktif	33958
25	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring evaluasi	4
26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan kota sehat	62
		Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan tatanan indikator Kecamatan Sehat	5
27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pelayanan rumah sakit Kutaringin	12
28	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional	18
29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	aktu penyediaan operasional labkesda	12
30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang disurvei oleh komisi akreditasi	9
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pra dan pasca akreditasi	36
31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah laporan SKDR yang dikirim tepat waktu	36
		Jumlah laporan SKDR yang dikirim dalam kurun waktu 1 tahun	

C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah jenis pemenuhan layanan peningkatan sistem informasi kesehatan	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang membuat profil kesehatan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	20
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sistem informasi kesehatan	18
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	18 unit laptop untuk pengelolaan ePPGBM Puskesmas	-
D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes yang dilakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis	22
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah bidang PME diikuti	5
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	18
		Jumlah jenis akreditasi labratorium	1
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti tahapan status BLUD	12
3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan mendapatkan pelayanan rujukan	5
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan kesehatan rujukan	19
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Diberikan Rekomendasi Izin Praktik	200
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi ijin praktek	200
B	Perencanaan Kebutuhan dan	Waktu Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah Di Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya	12

	Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota		
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan dan administrasi non ASN yang sesuai standar	292
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	umlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mendapat pembinaan dan pengawasan	85
C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis layanan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	1
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang telah memiliki izin serta pemeriksaan rutin dalam rangka pengkajian izin.	40
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertntu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan penerbitan izin produksi bagi industri rumah tangga	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta	Jumlah IRTP yang tersertifikasi	40

	Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan pemeriksaan pada industri rumah tangga	
1	Pemeriksaan postmarket pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah sampel produk makanan dan minuman yang dilakukan uji lab	50
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah rapat yang diadakan terkait perizinan industri rumah tangga	-
A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Advokasi Pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	2
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1
B	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	jumlah kegiatan promotif dan preventif yang diselenggarakan	
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah Penyuluhan Kesehatan Mendukung Germas dan PHBS	9

	Bersih dan Sehat		
C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan	
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Monitoring Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	10
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	12
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	589
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1

	SKPD		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	13
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketertiban administrasi BMD	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikasi aset	16
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketertiban administrasi kepegawaian	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut	250
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan cetak dan penggandaan	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	
1	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia	19
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	4
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12

		waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai	2
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	113
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Triwulan IV tahun 2022 dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup sebagai tujuan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN
(Bab III, 3.1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1.	Meningkatnya status kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	100/ 100.000 KH	205/ 100.000 KH	-5 %	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	18/1.000 KH	12,34/1.000 KH	131%	
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek, sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	25%	4,78%	181 %	
		Persentase Desa/ Kelurahan siaga aktif	85%	86%	101%	
		Capaian sasaran strategis 1			102 %	
2	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Prevalensi HIV (persen)	0,5%	0,12%	176%	Sangat Tinggi
		Cakupan Kel./Desa KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	
		Imunisasi Dasar Lengkap	95%	96%	101%	
Capaian sasaran strategis 2					125 %	
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100%	83%	83%	Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
	masyarakat					
Capaian sasaran strategis 3					83 %	
4	Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan obat, dan Sumber Daya Kesehatan	Ketersediaan 9 jenis tenaga di Puskesmas	95%	72,22%	76%	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai	95%	49,78%	52,4%	
		Persentase penduduk miskin yang terlayani di fasilitas kesehatan	100%	100%	100%	
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk	1:16.000	1:5.678	164%	
Capaian sasaran strategis 4					98,1%	
5	Meningkatnya pelayanan publik	Rata-rata survei kepuasan masyarakat	99 Indeks	83,75 Indeks	84,6%	Tinggi
Capaian sasaran strategis 5					84,6%	
Total Keseluruhan= (102 % + 125 % + 83 % + 98,1 % + 84,6% / 5					98,54	

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel diatas dari lima sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran strategis sebanyak 6 indikator telah berhasil memenuhi target di Triwulan II walaupun bersifat sementara karena di Triwulan berikutnya biasa berubah sesuai realisasi. Dan adapula 2 indikator yang berada di jalur pemenuhan target serta ada pula 5 target indikator yang belum memenuhi standar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun telah memenuhi target. AKB pada tahun 2022 mencapai 12,34 /1.000 KH atau 54 kasus dari target 18/1.000 KH. Adapun penyebab kematian yaitu neonatus mencapai 44 kasus dan kematian bayi mencapai 10 kasus. Berdasarkan data dilapangan angka kelahiran hidup 4.374 jiwa. Penyebab kematian neonatus (0-28 hari) terdiri dari 13 kasus bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), 11 kasus dengan asfiksia, 1 kasus sepsis/infeksi, 12 kasus kelainan kongenital, 7 kasus lainnya hasil dari audit maternal di lapangan (1 kasus distosia bahu, 1 kasus lambung bocor, 1 kasus gastroschisis, 2 kasus suspek aspirasi, 2 kasus pneumonia aspirasi). Bayi (umur 29 hari-11 bulan) terdapat kematian yang disebabkan 1 kasus pneumonia, 2 kasus diare, 3 kasus kelainan jantung, 1 kasus kelainan kongenital dan 3 kasus lainnya.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya skrining bayi baru lahir dengan program SHK;
2. Advokasi atau konseling/penyuluhan melalui media cetak dan digital terkait aspek tanda-tanda bahaya serta pencegahan kematian pada bayi;
3. Melakukan pelayanan kesehatan dengan metode kunjungan rumah dari kunjungan neonatus hari pertama sampai hari ke tujuh.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi posyandu;
2. Meningkatkan transformasi KMS kedalam buku KIA;
3. Meningkatkan kompetensi dari kader posyandu;
4. Menyelenggarakan pemberian makanan PMT.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersediannya jaminan kesehatan untuk bayi baru lahir;
2. Tersedianya fasilitas kesehatan yang tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Telaksananya *workshop* AMP untuk tenaga kesehatan;
4. Terlaksananya kegiatan forum peduli kesehatan ibu dan anak (KIA);
5. Terlaksananya pelatihan petugas kesehatan sebagai peningkatan kompetensi.

2. ANGKA KEMATIAN IBU.

Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami fluktuasi naik turun, dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. AKI mencapai 205/100.000 KH atau 9 kasus pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 346/100.000 KH atau 18 kasus. Dapat digambarkan kematian ibu pada tahun 2022 ini terdiri dari 4 kasus perdarahan hebat saat persalinan *post Sectio Caesaria* (SC), 5 kasus Hipertensi dalam kehamilan yang mengarah ke *Pre-Eklamsia* menyebabkan terjadinya *Eklamsia*.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan masih kurang untuk penanganan kegawatdaruratan pada proses persalinan;
2. Ketersediaan alat medis dan non medis yang belum memadai;
3. Sarana transportasi bagi tenaga kesehatan di desa masih terbatas ;
4. Transportasi rujukan dari desa ke Rumah Sakit rujukan kurang standar.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pemahaman kehamilan kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan di dalam gedung puskesmas dapat berupa konseling, dan diluar gedung puskesmas seperti kegiatan kelas ibu hamil, posyandu dan UKBM lainnya;
2. Melakukan kegiatan cakupan ANC ibu hamil kontak lengkap (K4);
3. Melaksanakan orientasi tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas tenaga serta kompetensi tenaga kesehatan dengan pelatihan;
4. Memenuhi sarana prasarana di puskesmas seperti penyediaan mobil *ambulance*, penyediaan alat kesehatan dan ruang bersalin sesuai standar.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya tempat pelayanan persalinan normal di puskesmas dan jaringannya;
2. Tersedianya layanan rujukan persalinan dari puskesmas ke rumah sakit;
3. Tersediannya jaminan kesehatan untuk persalinan normal di FKTP termasuk klinik swasta;
4. Tersedianya jaminan biaya kesehatan persalinan resiko tinggi (perawatan dan tindakan operasi persalinan, perawatan, dan tindakan *curettage*, perawatan dan tindakan KB pasca salin, pemeriksaan *post natal care*)

3.PREVALENSI STUNTING.

Balita yang diukur sebanyak 16.482 balita dengan kasus stunting 788 balita. Penyebab terjadinya Stunting di nilai dari 1000 hari kehidupan pertama janin dalam tubuh ibu dengan pengaruh faktor genetik, gizi ibu serta lingkungan (konsumsi makanan sehat, kebersihan atau sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih).

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan teknik dan manajemen dokter, bidan dan petugas puskesmas lainnya melalui workshop peningkatan kapasitas tatalaksana gizi buruk, sosialisasi dan koordinasi suplementasi gizi, penguatan dan pelaksanaan dalam pedoman gizi seimbang;
2. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang/buruk, bumil KEK.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembinaan kader 100 HPK, pemantauan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi dan balita;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan lintas sector dalam pelaksanaan surveilans gizi.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya kader kesehatan gizi sebagai surveilans;
2. Tersediannya fasilitas kesehatan pendukung seperti posyandu balita di setiap desa/kecamatan;

3. Dukungan lintas sektor yang kuat terhadap program gizi untuk penurunan angka *stunting*.

4.Persentase Desa/Kelurahan SIAGA AKTIF.

Persentase desa/kelurahan siaga aktif mencapai 86% dengan target 85% pada tahun 2022. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 94 desa dan yang aktif desa siaganya sebanyak 81 desa. Desa yang mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes) atau upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana, dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya promotif dan preventif melalui konseling dari pintu ke pintu desa sehat dan UKBM lainnya;
2. Tersedianya kader untuk desa siaga;
3. Tersedianya pelayanan seperti posyandu, sarana sederhana (obat dan alat di desa, tersedianya tenaga kesehatan di desa serta dana operasional di desa);
4. Tersedianya data atau catatan jumlah KK dan keluarga.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah di setiap desa;
2. Terlaksananya pertemuan edukasi penguatan implementasi 5 pilar STBM kepada kader desa sehingga kader mampu memotivasi masyarakat untuk mampu mengatasi masalah secara mandiri dengan melakukan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya jamban sehat, bebas ODF, sanitasi bersih serta pelayanan kesehatan didukung keaktifan kader;
2. Tersedianya petugas kader mandiri yang mampu melakukan pelayanan kesehatan sederhana;
3. Terlaksananya pertemuan forum kecamatan/desa dan pokja desa dalam rangka pembinaan kecamatan/desa sehat.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini terdapat 1 indikator yang tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen program kesehatan ibu dan sistem rujukannya;
2. Meningkatkan pendidikan kesehatan (pengetahuan) dan konseling promosi kesehatan ibu, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan perempuan serta melakukan deteksi dini pada kasus;
3. Pengembangan fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama Rumah Sakit Kutaringin dan gedung Poned;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kesehatan ibu
5. Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu;
6. Dukungan anggaran tambahan dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu.

5. PREVALENSI HIV

Prevalensi HIV mencapai 0,12% dengan target 0,50% pada tahun 2022. Dengan sasaran jumlah penduduk beresiko 272.589 jiwa dengan jumlah penderita HIV sebanyak 348 jiwa. Dengan perhitungan jumlah kasus HIV dibagi jumlah penduduk yang beresiko dikali 100%.

Adapun analisis tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembekalan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan;
2. Peningkatan skrining HIV pada masyarakat beresiko, skrining wajib bagi ibu hamil, populasi kunci LSL (Laki Seks Lelaki) meningkat, WPS (Wanita Pekerja Seksual) masih aktif dan menyebar di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Dukungan pemerintah beserta LSM dalam program penanggulangan HIV/AIDS.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama antara KPA, LSM dan Dinas Kesehatan untuk melakukan proses pendampingan terhadap orang terinfeksi HIV;
2. Terlaksananya skrining sebagai deteksi dini HIV.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi peraturan pemerintah yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesesuaian visi dan misi dalam pengendalian kasus HIV;
2. tersedianya kualitas SDM dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi/aplikasi;
3. Tersedianya alat pemeriksaan untuk skrining melalui program *mobile* VCT;
4. Adanya peran lintas sektor dan penjangkau untuk melakukan kegiatan atau penjangkauan pada populasi berisiko, ketersediaan logistik yang memadai juga mendukung dalam pencapaian program,

6.CAKUPAN DESA/KELURAHAN KLB YANG DITANGANI < 24 JAM.

KLB pada tahun 2022 masih merujuk pada belum dicabutnya status pandemi COVID-19. Hasil realisasi 100% diperoleh dari 81 kelurahan/desa yang mengalami KLB seluruhnya ditangani kurang dari 24 jam.

Adapun analisis tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terdapat desa yang memiliki posko PPKM berskala mikro, sehingga begitu muncul kasus langsung dapat di tangani;
2. Dukungan pemerintah dan lintas sektor dalam penanganan KLB.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Membuat posko bantuan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak disetiap lokasi KLB contohnya bencana banjir

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Adanya sinergi antara aparat desa, puskesmas, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sudah terjalin dalam menangani kasus COVID-19;

2. Terdapat posko bantuan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak disetiap lokasi KLB contohnya bencana banjir.

7.IMUNISASI LENGKAP.

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap mencapai 96% dengan target 95% pada tahun 2022. Dengan sasaran 5.126 bayi dan jumlah yang dilakukan imunisasi sebanyak 4.923 bayi.

Adapun analisis tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan ibu untuk berperan aktif dalam pelaksanaan imunisasi dasar lengkap;
2. Dukungan keluarga dalam kesehatan anak-anaknya untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
3. Keterjangkauan tempat pelayanan imunisasi dari tempat tinggal masyarakat.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi atau kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap;
2. Melaksanakan kegiatan *mobile* imunisasi di setiap desa.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan atau pos terpadu yang mendukung layanan imunisasi;
2. Peningkatan kapasitas penganggaran daerah melalui advokasi kepemangku kebijakan daerah.

8.PERSENTASE PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI.

Rendahnya angka capaian persentase puskesmas yang terakreditasi disebabkan karena kegiatan survey oleh tim surveyor Kementerian Kesehatan tidak dilakukan karena dipengaruhi adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang belum dapat melaksanakan akreditasi di tahun 2022 sampai diterbitkannya pedoman/juknis akreditasi terbaru.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya wabah COVID-19 sehingga tidak terselenggaranya akreditasi oleh Kementerian Kesehatan;
2. Belum terbitnya pedoman/juknis terbaru tentang akreditasi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan kepada puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi ataupun reakreditasi;
2. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait jadwal pelaksanaan akreditasi puskesmas.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Terlaksananya pendampingan puskesmas dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kementerian Kesehatan RI;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar

9 .KETERSEDIAAN 9 JENIS TENAGA DI PUSKESMAS

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**.

9 jenis tenaga Kesehatan terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Ketersediaan 9 jenis tenaga di puskesmas mencapai 72,22% dengan target 90% pada tahun 2022. Ketersediaan puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 18 puskesmas dengan ketersediaan 9 jenis tenaga hanya ada di 13 puskesmas.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

Proses pengangkatan tenaga kontrak daerah tidak mampu menyediakan tenaga kesehatan tertentu (dokter gigi) akibat minat dari dokter gigi untuk dikontrak di fasilitas layanan kesehatan daerah terpencil tidak ada walaupun anggaran mencukupi. Selain itu juga belum adanya pemerataan tenaga kesehatan seperti tenaga sanitarian, karena jarang ada peminatnya atau keterbatasan jenis tenaga kesehatan ini yang sesuai standar.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Adanya kebijakan pemerintah untuk ketersediaan tenaga kesehatan yang merata baik jenis dan jumlahnya.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan 9 jenis tenaga di 18 puskesmas dengan Terlaksananya pengangkatan TKD pada tahun 2022

10 .PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI.

Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai mencapai 49,78% dengan target 95%. Jumlah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan mencapai 452 item dengan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia hanya mencapai 225 item.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pada proses pengadaan terdapat penyedia yang menolak permintaan pengadaan karena beberapa alasan, seperti keterbatasan jumlah obat (CTM, thiamin, deksametason) di tingkat produsen, penarikan karena permasalahan izin edar (griseopulvin tab), dan perhitungan rencana kebutuhan obat (RKO) yang belum akurat;
2. Terdapat penyedia yang membatalkan perjanjian kontrak karena tidak bisa memenuhi seluruh permintaan obat yang dituangkan dalam kontrak/srat pesanan, obat di recall sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi Badan POM;
3. Pada proses pengadaan bahan medis terdapat penyedia yang tidak memenuhi seluruh pesanan disebabkan kondisi stok nasional yang tersedia;
4. Reagen merupakan salah satu komponen yang ketersediaan anggarannya tidak terlalu banyak, sehingga pengadaan reagen pada satu tahun anggaran langsung terdistribusi ke Puskesmas dan menyisakan hanya beberapa item di IFK pada periode akhir tahun 2022.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penggunaan dana JKN untuk memenuhi kebutuhan obat di puskesmas agar pelayanan tidak terganggu/terhambat, pasien tetap bisa mendapatkan obat/bahan medis yang dibutuhkan sesuai resep dokter;
2. Permintaan ke Dinas Kesehatan Provinsi juga membantu mengatasi kekosongan obat walau sifatnya hanya sementara karena stok buffer obat di Dinas Kesehatan Provinsi tidak selalu sejalan dengan kebutuhan;
3. Pengelola obat di puskesmas diminta proaktif memberikan informasi kepada tenaga medis tentang obat-obat yang tersedia agar pada saat meresepkan obat-obat kepada pasien dapat mempertimbangkan beberapa pilihan obat yang memiliki indikasi/khasiat yang serupa.

11 .PERSENTASE PENDUDUK MISKIN YANG TERLAYANI DI FASILITAS KESEHATAN

Keberhasilan capaian Persentase penduduk miskin yang terlayani di fasilitas kesehatan dikarenakan seluruh masyarakat miskin telah menjadi peserta dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persentase penduduk miskin yang terlayani di fasilitas kesehatan mencapai 100% dari target 100%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 66.271 jiwa dengan jumlah penduduk miskin yang terlayani di fasilitas kesehatan sebanyak 66.271 jiwa.

Adapun analisis tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan kesehatan berupa penyediaan Jaminan Kesehatan (JKN).

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Mendaftarkan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam cakupan kepesertaan JKN-KIS sehingga seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibiayai oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah tersebut.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

Adanya program BPJS dengan data dukung telah terdaftar atau didaftarkan kedalam kepesertaan JKN-KIS segmen PBI APBD/PBPU dan BP Pemda maka penduduk tersebut dilayani secara maksimal 100% oleh fasilitas kesehatan.

12 .RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, PUSTU PERSATUAN PENDUDUK

Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa adanya penambahan ruang poskesdes, penambahan ruang pustu, penambahan ruang bersalin, rehabilitasi gedung dan rehabilitasi polindes. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu mencapai 1:5.678 dengan target 1:16.000 pada tahun 2022. Jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 272.589 jiwa dengan jumlah fasilitas klinik dan puskesmas sebanyak 48 unit.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Telah dilaksanakannya pembangunan, pengembangan, rehab pada pustu, polindes, dan poskesdes.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa Terlaksananya perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini terdapat 1 indikator yang tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginvestasikan sumber daya untuk membangun definisi operasional dan pengukuran mutu layanan kesehatan
2. Menyediakan sumber daya dan panduan strategi peningkatan mutu di pusat layanan kesehatan publik
3. Memperbaiki pemanfaatan pembiayaan yang strategi berbasis pasar untuk menghasilkan insentif bagi perbaikan mutu layanan kesehatan

13.RATA -RATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.

Target perolehan rata-rata nilai indeks pelayanan dari 17 unit Puskesmas dan 1 unit laboratorium kesehatan daerah pada semester 2 tahun 2022 sebesar 83,75 berada pada kategori sangat baik. Pemenuhan target berdasarkan kategori telah tercapai, namun berdasarkan indeks masih belum memenuhi target terdapat selisih indeks 5,26.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat responden yang memberikan nilai persepsi kurang dari 4 untuk setiap unsur pelayanan dari 9 unsur penilaian yang dinilai, hal ini dikarenakan belum seluruh responden merasakan:
 - a. Persyaratan pelayanan sangat sesuai kebutuhan;
 - b. Prosedur pelayanan sangat mudah;
 - c. Waktu penyelesaian sangat cepat;
 - d. Kewajaran biaya pelayanan gratis;
 - e. Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan sangat sesuai;
 - f. Kemampuan petugas pelayanan sangat kompeten;
 - g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola dengan baik;
 - h. Sarana dan prasarana sangat baik.
2. Ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM Kesehatan yang kompeten di setiap unit pelayanan tidak merata, khususnya antar puskesmas;
3. Target yang ditetapkan terlalu ambisius atau nyaris sempurna, sesuatu yang hampir tidak mungkin diperoleh dari sebuah penilaian berdasarkan subjektivitas responden.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Terlaksananya kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan kesehatan di FKTP/Puskesmas dan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan analisa sebagai berikut:

Adanya dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke FKTP/ Puskesmas untuk membantu memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi FKTP/Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022				Realisasi Kinerja Tahun 2022				Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2022				Interprestasi	Keterangan	
					TW . I	TW . II	TW . III	TW . IV	TW . I	TW . II	TW . III	TW . IV	TW . I	TW . II	TW . III	TW . IV		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Dinas Kesehatan																		
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Pratama (kumulatif)	100	Person	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
		Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	50	Person	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Memenuhi Target		

		Persentase Pustu/Pos kesdes /Polindes yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	50	Person	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Memenuhi Target		
		Persentase pengadaan alat Kesehatan Rumah Sakit yang sesuai standar	100	Person	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target		
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan di Puskesmas melalui proses penyediaan, distribusi dan money	100	Person	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target		

		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Person	100%	100%	100%	100%	24%	24%	73%	105%	24%	24,00%	73,00%	105%	Memenuhi Target		
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	Person	100%	100%	100%	100%	24%	25%	25%	83%	24%	25,00%	25,00%	83%	Belum Memenuhi Target	Jarak tempuh yang jauh dari rumah masyarakat di Pedesaan ke Fasyankes, tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai alat transportasi, serta sarana ditempatkan persalinan yang belum terstandar.	Perlunya sarana transportasi untuk menjemput ibu hamil yang mau bersalin ke Fasyankes di pedesaan (poskesdes) serta peningkatan sarana dan prasarana di Poskesdes.

		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Person	100%	100%	100%	100%	26%	23%	76%	101%	26%	23,00%	76,00%	101%	Memenuhi Target		
		Persentase pelayanan kesehatan balita	100	Person	100%	100%	100%	100%	24%	21%	26%	73%	24%	21,00%	26,00%	73%	Belum Memenuhi Target	Rendahnya kunjungan ke jaringan dan jejaring pada saat usia 12 bulan ke atas.	Meningkatkan promosi untuk kunjungan Balita dan koordinasi lintas sektor yang terkait
		Persentase pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar	100	Person	100%	100%	100%	100%	17%	43%	45%	106%	17%	43,00%	45,00%	106%	Memenuhi Target		
		Persentase pelayanan kesehatan usia produktif	100	Person	100%	100%	100%	100%	15%	27%	75%	94%	15%	27,00%	75,00%	94%	Belum Memenuhi Target	Mobile penduduk usia produktif yang tidak menetap di suatu wilayah, kurangnya koordinasi dengan perusahaan	Koordinasi dengan perusahaan yang berada di wilayah kerja masing-masing wilayah kerja Puskesmas

																		an dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM	
		Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut	100	Person	100%	100%	100%	100%	41%	74%	81%	1011%	41%	73,98%	80,58%	100%	Memenuhi Target		
		Persentase pelayanan Kesehatan orang penderita hipertensi	100	Person	100%	100%	100%	100%	100%	31%	40%	7300%	100%	31,00%	40,00%	73%	Belum Memenuhi Target	Rendahnya capaian disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM dan	Mou dengan perusahaan, instansi/ lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM di wilayah kerja masing-masing Puskesmas

																		kurangnya inovasi Puskesmas dalam pelaksanaan	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	Person	100%	100%	100%	100%	23%	71%	79%	117%	23%	71,00%	79,00%	117%	Memenuhi Target		
		Persentase pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100	Person	100%	100%	100%	100%	28%	80%	94%	96%	28%	80,00%	93,58%	96%	Belum Memenuhi Target	Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ, keluarga menganggap jika ada anggota keluarga dengan ODGJ sebagai sebuah	Meningkatkan pendekatan lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada keluarga serta membentuk kader kesehatan jiwa tingkat desa/kel

																		aib dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar	uraian
		Persentase pelayanan TB Paru	100	Person	100%	100%	100%	100%	35%	47%	47%	115%	35%	46,50%	47,00%	115%	Memenuhi Target		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan (HIV-AIDS)	100	Person	100%	100%	100%	100%	15%	35%	35%	123%	15%	35,29%	35,29%	43%	Belum Memenuhi Target	Data target sasaran tidak sesuai dengan data perbub kabupaten tahun 2022 yaitu 8249	

																		bila sesuai dengan target tahun berjalan 2022 yaitu 7275 (86,30%)	
		Persentase Desa/kelurahan UCI	100	Persen	100%	100%	100%	100%	65%	68%	71%	89%	65%	68,08%	71,30%	89%	Memenuhi Target	10 Desa/Kelurahan tidak memenuhi target IDL, sedangkan 84 Desa/Kelurahan lainnya mengalami kelebihan cakupan hingga melebihi	

																	target, mengga mbarka n mobilita s yang tinggi antar Desa yang menyeb abkan tidak meratan ya Desa/kel urahan UCI.	
		Persentase Desa/kelu rahan yang mampu melaksan akan kesiapsiag aan dlm penanggul angan kedarurat an Kesehatan masyarak	100	Perse n	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Mem enuh i Targe t	

		at yg berpotnsi wabah																	
		Persentase pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	100	Perse n	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Mem enuh i Targe t		
		Persentase Desa/Kelu rahan menduku ng Penyeleng garaan Kabupate n /Kota Sehat	55	Perse n	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	15 %	31 %	45 %	12 6%	15 %	31 %	45 %	12 6%	Mem enuh i Targe t		
		Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	100	Perse n	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	Belu m Mem enuh i Targe t		
		Persentase peningkatan kapasitas	90	Perse n	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Belu m Mem enuh		

		laboratori um kesehatan daerah															i Targe t		
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)														10 0%			
		Predikat Kinerja																	
A	Penyediaa n Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenang an Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesma s dan jaringanny a yang sesuai standar																	
1	Pembangu nan Puskesma s	Jumlah Puskesma s yang dibangun	4	unit	3	3	3	3	3	3	3	4	10 0%	100 %	100 %	13 3%	Mem enuh i Targe t		
2	Pembangu nan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Kesehatan lasinnya yang di bangun	4	unit	4	4	4	4	4	4	4	5	10 0%	100 %	100 %	12 5%	Mem enuh i Targe t		
3	Pembangu nan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga Kesehatan yang	2	unit	2	2	2	2	2	2	2	2	10 0%	100 %	100 %	10 0	Mem enuh i Targe t		

		dibangun																	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Gedung puskesmas yang direhabilitasi	2	unit	2	2	2	2	1	1	1	1	50 %	50 %	50 %	50 %	Memenuhi Target		
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung fasilitas Kesehatan lainnya	9	unit	9	9	9	9	9	9	9	10	100 %	100 %	100 %	111 %	Memenuhi Target		
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan	3	jenis	3	3	3	3	3	3	3	10	100 %	100 %	100 %	300 %	Memenuhi Target		
7	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan Puskesmas	18	unit	18	18	18	18	18	18	18	18	100 %	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target		

[illegible]

1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.750	Bumil	4.750	4.750	4.750	4.750	1.369	2.615	3.426	5011	#####	55,05%	72,13%	105%	Memenuhi Target		
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.534	Bulin	4.534	4.534	4.534	4.534	1.119	2.232	3.312	4376	#####	49,23%	73,05%	97%	Belum Memenuhi Target	Jarak tempuh yang jauh dari rumah masyarakat di Pedesaan ke Fasyankes, tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai alat transportasi, serta sarana ditempat persalinan yang belum	Perlunya sarana transportasi untuk menjemput ibu hamil yang mau bersalin ke Fasyankes di pedesaan (poskesdes) serta peningkatan sarana dan prasarana di Poskesdes.

																		terstand ar.	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat kan pelayanan kesehatan	4.3 18	Bayi baru lahir	4.3 18	4.3 18	4.3 18	4.3 18	1.1 19	2.2 24	3.2 69	43 62	## ## #	51, 51 %	75, 71 %	10 1%	Mem enuh i Targe t		
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat kan pelayanan kesehatan	18. 939	Balita	18. 939	18. 939	18. 939	18. 939	6.3 66	10. 747	13. 280	15 770	## ## #	56, 75 %	70, 12 %	83 %	Belu m Mem enuh i Targe t	Rendah nya kunjung an k jaringan dan jejaring pada saat usia 12 bulan	Meningk atkan promosi untuk kunjung an Balita dan koordina si lintas sektor

																		ke atas.	yang terkait
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	46.948	Anak	46.948	46.948	46.948	46.948	12.534	18.142	46.011	49.825	###	38,64%	98,00%	106%	Memenuhi Target		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	180358	Orang	2E+05	2E+05	2E+05	2E+05	25258	49759	1E+05	2E+05	###	27,59%	80,98%	94%	Belum Memenuhi Target	Mobile penduduk usia produktif yang tidak menetap di suatu wilayah, kurangnya koordinasi dengan perusahaan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM	Koordinasi dengan perusahaan yang berada di wilayah kerja masing-masing wilayah kerja Puskesmas

7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	12.908	Lansia	12.908	12.908	12.908	12.908	8.215	8.779	11.207	12.033	###	68,01%	86,82%	93%	Belum Memenuhi Target		
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Usia produktif yang di Deteksi Dini /Skreening Hipertensi sesuai standar	53566	Orang	53566	53566	53566	53566	3760	16203	25566	39104	7,02%	30,25%	47,73%	73%	Belum Memenuhi Target	Rendahnya capaian disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM dan kurangnya inovasi Puskesmas dalam pelaksanaan	Mou dengan perusahaan, instansi/ lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM di wilayah kerja masing-masing Puskesmas

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Usia produktif yang di Deteksi Dini /Skreening Diabetes Mellitus sesuai standar	5591	orang	5591	5591	5591	5591	1230	2857	4584	6511	###	51,10%	81,99%	116%	Memenuhi Target		
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	409	Orang	409	409	409	409	117	211	379	379	###	51,59%	92,67%	93%	Belum Memenuhi Target	Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ, keluarga mengangap jika ada anggota keluarga dengan ODGJ sebagai sebuah aib dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar	Meningkatkan pendekatan lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada keluarga serta membentuk kader kesehatan jiwa tingkat desa/kelurahan

1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus TBC yang ditangani	400	Orang	400	400	400	400	139	186	474	460	### ### #	46,50%	### ### ###	115%	Memenuhi Target		
		Jumlah penemuan kasus suspek terduga TBC	4.000	Orang	4.000	4.000	4.000	4.000	1.130	2.065	3.445	4879	### ### #	51,63%	86,13%	122%	Memenuhi Target		
1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kasus HIV-AIDS yang diobati	120	Orang	120	120	120	120	158	133	133	148	### ### #	### ### ###	### ### ###	123%	Memenuhi Target		
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang diperiksa	6255	Orang	6255	6255	6255	6255	958	2.208	3.166	7275	### ### #	35,30%	50,62%	116%	Memenuhi Target		
1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator	18	Puskesmas	18	18	18	18	3	7	17	18	### ### #	38,89%	94,44%	100%	Memenuhi Target		

	Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	\program surveilsn																	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita yang mendapat penanganan gizi kurang dan gizi buruk	5	Balita	5	5	5	5	5	5	5	5	## ## #	### ### ###	### ### ###	100%	Memenuhi Target		
		Jumlah Puskesmas yang mendapat fasilitas penanganan gizi buruk	18	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	18	18	## ## #	### ### ###	### ### ###	100%	Memenuhi Target		
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan dan monitoring evaluasi	23	Pos UKK	23	23	23	23	3	12	19	23	## ## #	52,17%	82,61%	100%	Memenuhi Target		
		Jumlah sosialisasi dan pembinaan GP2SP	2	Kegiatan	2	2	2	2	0	2	2	2	0,00%	### ### ###	### ### ###	100%	Memenuhi Target		

16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengelola limbah medis dengan aman	20	Faske s	20	20	20	20	20	20	20	20	20	## ## #	### ### ###	### ### ###	10 0%	Mem enuh i Targe t		
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan Monev program kesehatan lingkungan	18	Pusk esma s	18	18	18	18	8	13	18	18	## ## #	72, 22 %	### ### ###	10 0%	Mem enuh i Targe t			
		Jumlah TPP dan TFU yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai standar	6	TPP /TFU	6	6	6	6	4	6	6	6	## ## #	### ### ###	### ### ###	10 0%	Mem enuh i Targe t			
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat	2	Media	2	2	2	2	0	2	2	2	0,0 0%	### ### ###	### ### ###	10 0%	Mem enuh i Targe t			

		waktu penyediaan promosi kesehatan melalui media radio lokal	6	Kali /kegiatan	6	6	6	6	0	2	2	6	0,00%	33,33%	33,33%	100%	Memenuhi Target		
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	18	Puskesmas	18	18	18	18	11	12	15	17	## ## #	66,67%	83,33%	94%	Belum Memenuhi Target	Kondisi cuaca, Akses jalan yang rusak akibat Banjir	Pembinaan dilaksanakan melalui daring
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan teknis surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	18	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	18	18	## ## #	### ### ###	### ### ###	100%	Memenuhi Target		

20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	409	Orang	409	409	409	409	117	211	379	379	###	51,59%	92,67%	93%	Belum Memenuhi Target	Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ, keluarga menggap jika ada anggota keluarga dengan ODGJ sebagai sebuah aib dan berpotensi mengganngu ketenangan masyarakat sekitar	Meningkatkan pendekatan lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada keluarga serta membentuk kader kesehatan jiwa tingkat desa/kelurahan
----	--	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	-----	-----------------------	--	---

21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180358	Orang	2E+05	2E+05	2E+05	2E+05	25258	49759	1E+05	2E+05	## ## #	27,59%	80,98%	94%	Belum Memenuhi Target	Mobile penduduk usia produktif yang tidak menetap di suatu wilayah, kurangnya koordinasi dengan perusahaan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM	Koordinasi dengan perusahaan yang berada di wilayah kerja masing-masing wilayah kerja Puskesmas
22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	145	Orang	145	145	145	145	135	135	135	135	## ## #	93,10%	93,10%	93%	Belum Memenuhi Target	Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan jumlah kuota CJH yang direncanakan berangkat ke tanah suci	Membentuk Posbindu PTM Calon Jemaah Haji (CJH) untuk CJH yang sudah mendapatkan nomor porsi

23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah capaian pengobatan massal kecacingan	59.860	Anak	59.860	59.860	59.860	59.860	3131	3131	3131	67454	5,23%	5,23%	5,23%	113%	Memenuhi Target		
		jumlah deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	5488	Bumil	5488	5488	5488	5488	988	1912	3028	4054	## ## #	34,84%	55,17%	74%	Belum Memenuhi Target	Tidak semua Ibu Hamil K1 yang mau dirujuk oleh jejaring lintas program untuk dilakukan pemeriksaan Triple Eliminasi (Hepatitis B, HIV, dan SIPILIS) di Puskesmas	Kerjasama lintas program dan jejaring terkait pembagian logistik RDT HBSaG
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang belum mendapat jaminan Kesehatan (Universal	50000	Orang	50000	50000	50000	50000	8247	13675	25911	9139	## ## #	27,35%	51,82%	18%	Memenuhi Target dengan Indik		

		Health Coverage															ator Terbalik		
		Jumlah peserta iuran PBPU Pemda	50000	Orang	50000	50000	50000	50000	41753	44572	66022	66271	###	89,14%	###	133%	Memenuhi Target		
		Waktu bantuan iuran PBPU mandiri Kelas III yang aktif	33958	Bulan	33958	33958	33958	33958	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			
25	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza di fasyankes dan sekolah	180358	Orang	2E+05	2E+05	2E+05	2E+05	25258	49759	1E+05	2E+05	###	27,59%	80,98%	94%	Belum Memenuhi Target	Mobile penduduk usia produktif yang tidak menetap di suatu wilayah, kurangnya koordinasi dengan perusahaan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan skrining	Koordinasi dengan perusahaan yang berada di wilayah kerja masing-masing wilayah kerja Puskesmas

																		PTM	
26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan kota sehat	62	Desa/kelurahan	62	62	62	62	9	19	28	81	## ## #	30,65 %	45,16 %	131 %	Memenuhi Target		
		Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan tatanan indikator Kecamatan Sehat	5	Kecamatan	5	5	5	5	0	0	0	5	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100 %	Memenuhi Target		
27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan pelayanan rumah sakit Kutaringin	12	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target		

28	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional	18	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Waktu penyediaan operasional labkesda	12	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Jumlah Puskesmas yang disurvei oleh komisi akreditasi	9	Puskesmas	9	9	9	9	15	15	15	15	###	###	###	167%	Memenuhi Target		
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pra dan pasca akreditasi	36	Puskesmas	36	36	36	36	0	15	15	15	0%	41,67%	41,67%	42%	Belum Memenuhi Target	Tidak terlaksananya survey akreditasi oleh Kementerian Kesehatan (tim surveyor) akibat pandemi COVID-19	Mengusulkan penjadwalan ulang ke Kementerian Kesehatan

31	Pelaksanaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah laporan SKDR yang dikirim tepat waktu	936	Laporan	936	936	936	936	78	234	702	882	8,33%	25,00%	75,00%	94%	<p>Belum Memenuhi Target</p> <p>Laporan bersifat mingguan, Laporan tepat waktu berjumlah 882 laporan di karenakan penanggung jawab terlambat penerimaan data kasus yang salah satu kendala sinyal. Pergantian Petugas surveilans Pusk. kelengkapan laporan sudah mencapai target kabupaten</p> <p>Untuk mempertahankan tepat dan lengkap laporan SKDR , pemantauan rutin terus dilakukannya. Segera</p>
----	-----------------------------------	--	-----	---------	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-------	--------	--------	-----	---

		Jumlah laporan SKDR yang dikirim dalam kurun waktu 1 tahun	936	Laporan	936	936	936	936	78	234	702	882	8,33%	25,00%	75,00%	94%	Memenuhi Target		
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah jenis pemenuhan layanan peningkatan sistem informasi kesehatan																	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang membuat profil kesehatan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	20	buku	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan pembinaan pengelola	18	Fasyankes	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		

		n sistem informasi kesehatan																	
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah unit PC All In One yang tersedia untuk pelayanan Telekonsultasi	5	Unit	5	5	5	5	0	0	0	5	0%	0%	0%	100%	Memenuhi Target		
D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan																	
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah fasyankes yang dilakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis	22	Fasyankes	22	22	22	22	0	5	15	27	0%	22,73%	68,18%	123%	Memenuhi Target		

	/Kota																		
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah bidang PME diikuti	5	Bidang	5	5	5	5	0	0	0	5	0%	0%	0%	100%	Memenuhi Target		
		jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	18	Faske	18	18	18	18	15	15	15	15	## ## #	83, 33 %	83, 33 %	83 %	Memenuhi Target	Tidak terlaksananya survey akreditasi oleh Kementerian Kesehatan (tim surveyor) akibat pandemi COVID-19	Mengusulkan penjadwalan ulang ke Kementerian Kesehatan
		Jumlah jenis akreditasi laboratorium	1	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	1	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Memenuhi Target		
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti tahapan status BLUD	12	Pusk esma s	12	12	12	12	0	0	18	18	0%	0%	### ###	15 0%	Memenuhi Target		

3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan mendapatkan pelayanan rujukan	5	Orang	5	5	5	5	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	Memenuhi Target dengan Indikator Terbalik		
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan kesehatan rujukan	19	Puskesmas / rUJUKAN	19	19	19	19	19	19	19	19	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)														100%			
		Predikat Kinerja																	
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik	100	Person	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertntu yang Dapat Diproduks i oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan penerbita n izin produksi bagi industri rumah tangga																	
	Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor	Jumlah IRTP yang tersertifik asi	40	Unit	40	40	40	40	19	19	20	20	## ## #	47, 50 %	50, 00 %	50 %	Belu m Mem enuh i Targe t	Anggara n tidak mencuk upi utuk mencap ai 45 sarana	Untuk apotek dan toko obat yang berada didalam kota tetap dilakuka n kegiatan walau pu n dana tidak

[illegible]

[illegible]

A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan																	
1	Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, Advokasi , kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Advokasi [pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat)	2	Kegiatan	2	2	2	2	0	0	2	2	0%	0%	100 %	100 %	Memenuhi Target		
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan	1	1	1	1	0	0	1	1	0%	0%	100 %	100 %	Memenuhi Target		

[illegible]

[illegible]

A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	Dokumen	8	8	8	8	0	2	4	8	0%	25%	50%	100%	Memenuhi Target		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target		

[illegible]

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan																	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	589	ASN	589	589	589	589	552	552	552	552	94%	94%	94%	94%	Belum Memenuhi Target	Realisasi sesuai dengan jumlah ASN yang ada di Dinas Kesehatan. Pengurangan ASN disebabkan karena adanya pegawai yang pindah, pensiun atau meninggal	Perlunya koordinasi dengan Subbag kepegawaian terkait dengan data pegawai yang akan pensiun pada periode tahun berikutnya

C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik																	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikat asset	16	Dokumen	16	16	16	16			14	16	0%	0%	88%	100%	Memenuhi Target		
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur																	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut	145	stel	250	250	250	250	0	0	0	145	0%	0%	0%	100%	Memenuhi Target		
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	4	4	4	4	0	0	4	4	0%	0%	100%	100%	Memenuhi Target		
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)														100%			

		Predikat Kinerja																	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran																	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	Jenis	19	19	19	19	0	19	19	19	0%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	Jenis	7	7	7	7	0	7	7	7	0%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi Target	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21	Jenis	21	21	21	21	0	0	21	21	0%	0%	100%	100%	100%	Memenuhi Target	

[illegible]

1	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia	19	Buah	19	19	19	19	0	0	0	19	0%	0%	0%	100%	Memenuhi Target		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	4	Jenis	4	4	4	4	0	2	2	4	0%	50%	50%	100%	Memenuhi Target		
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	12	12	12	3	6	9	12	25%	50%	75%	100%	Memenuhi Target		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	12	12	12	12	3	6	9	12	25%	50%	75%	100%	Memenuhi Target		
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)														100%			

		Predikat Kinerja																	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara																	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai	2	Unit	2	2	2	2	0	0	1	2	0%	0%	50%	100%	Memenuhi Target		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	113	Buah	113	113	113	113	5	20	48	113	4%	18%	42%	100%	Memenuhi Target		
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2	Unit	2	2	2	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%	Memenuhi Target		

Keterangan Rata – rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja sesuai PERMENDAGRI No 6 TAHUN 2017 ;

- 91 ≤ 100 : Sangat tinggi
- 76 < 90 : Tinggi
- 66 < 75 : Sedang
- 51 < 65 : Rendah
- ≤ 50 : Sangat Rendah

3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan.

**TABEL CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(BAB III, 3.3)**

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah Sebesar Rp.147.721.212.000.00 Pada anggaran Perubahan, Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 139.460.245.815,00 atau sebesar 96,40 %

Adapun rincian penyerapan anggaran pada tahun 2022 sampai dengan triwulan ke IV adalah sebagai berikut :

					Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (s.d Bulan Desember)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
					DINAS KESEHATAN + UPT	Rp147.721.212.000	Rp139.460.245.815,00	94,40%	Rp8.260.966.185
					DINAS KESEHATAN	Rp117.731.678.050	Rp112.791.411.972	96,18%	Rp78.828.846.713
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp50.299.261.770	Rp49.386.254.803	88,52	Rp913.006.967
1	0	0	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp197.355.308	Rp186.747.526	79,31	Rp10.607.782
1	0	0	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp137.560.000	Rp127.049.576	72,70	Rp10.510.424
1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp10.904.900	Rp10.894.100	100,00	Rp10.800
1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp10.865.000	Rp10.860.850	100,00	Rp4.150
1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp7.672.500	Rp7.672.500	100,00	Rp0
1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp7.672.500	Rp7.663.500	100,00	Rp9.000
1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.899.185	Rp4.827.000	100,00	Rp72.185
1	0	0	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	Rp	81,55	Rp1.223

	2	1	7		17.781.223	17.780.000		
1	0 2	0 1	2,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 48.145.051.182	Rp 47.432.848.506,00	89,57	Rp712.202.676
1	0 2	0 1	2.02 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 47.583.002.432	Rp 46.886.837.183,00	89,72	Rp696.165.249
1	0 2	0 1	2.02 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 470.651.000	Rp 455.640.803,00	72,82	Rp15.010.197
1	0 2	0 1	2.02 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 86.448.000	Rp85.421.020	98,81	Rp1.026.980
1	0 2	0 1	2.02 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Rp 4.949.750	Rp4.949.500	54,03	Rp250
1	0 2	0 1	2,03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 154.279.800	Rp109.196.000	38,89	Rp45.083.800
1	0 2	0 1	2.03 0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 154.279.800	Rp109.196.000	38,89	Rp45.083.800
1	0 2	0 1	2,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 216.481.200	Rp206.254.875	43,05	Rp10.226.325
1	0 2	0 1	2.05 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 81.000.000	Rp 80.820.000,00	100,00	Rp180.000
1	0 2	0 1	2.05 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 12.198.000	Rp 9.556.000,00	100,00	Rp2.642.000
1	0 2	0 1	02.0 5 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 123.283.200	Rp 115.878.875,00	0,00	Rp7.404.325
1	0 2	0 1	02.0 1 1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 447.573.479	Rp 446.435.977,00	99,98	Rp1.137.502
1	0 2	0 1	2.06 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.400.909	Rp 20.400.909,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 1	2.06 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 105.035.760	Rp 104.856.849,00	100,00	Rp178.911
1	0 2	0 1	2.06 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 21.341.702	Rp 21.230.800,00	100,00	Rp110.902
1	0 2	0 1	2.06 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 4.970.000	Rp 4.875.000,00	98,09	Rp95.000
1	0 2	0 1	2.06 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 140.706.108	Rp 140.706.108,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 1	2.06 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 155.119.000	Rp 154.366.311,00	100,00	Rp752.689
1	0 2	0 1	2,07	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 82.953.212	Rp 82.082.362,00	56,62	Rp870.850
1	0 2	0 1	2.07 0 5	Pengadaan Mebel	Rp 16.428.000	Rp 16.428.000,00	100,00	Rp0

1	0 2	0 1	2.07	0 6	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 66.525.212	Rp 65.654.362,00	45,91	Rp870.850
1	0 2	0 1	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 902.232.556	Rp 778.356.671,00	51,95	Rp123.875.885
1	0 2	0 1	2.08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 623.306.956	Rp 505.304.696,00	51,55	Rp118.002.260
1	0 2	0 1	2.08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 278.925.600	Rp 273.630.975,00	52,84	Rp5.294.625
1	0 2	0 1	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 153.335.033	Rp 144.332.886,00	83,13	Rp9.002.147
1	0 2	0 1	2.09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 19.640.500	Rp 19.465.500,00	99,11	Rp175.000
1	0 2	0 1	2.09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 62.646.000	Rp 53.866.886,00	59,06	Rp8.779.114
1	0 2	0 1	2.09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 1	2.09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 21.048.533	Rp 21.000.500,00	99,77	Rp48.033
1	0 2	0 1	2.09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -			Rp0
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 56.593.193.884	Rp 52.735.096.015,00	67,24	Rp3.858.097.869
1	0 2	0 2	2,01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.857.083.634	Rp 18.096.976.712,00	71,50	Rp760.106.922
1	0 2	0 2	2.01	0 2	Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp 720.000.000	Rp 718.679.850,00	78,26	Rp1.320.150
1	0 2	0 2	2.01	0 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Rp 580.000.000	Rp 578.280.100,00	99,70	Rp1.719.900
1	2	2	2,01	0 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 300.000.000	Rp 298.888.300,00	99,63	Rp1.111.700
1	0 2	0 2	2.01	0 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp 302.936.200	Rp 302.584.800,00	99,88	Rp351.400
1	0 2	0 2	2.01	1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Rp 5.606.800.000	Rp 5.529.450.650,00	71,27	Rp77.349.350
1	0 2	0 2	2.01	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 5.729.966.050	Rp 5.700.096.408,00	99,48	Rp29.869.642

1	0 2	0 2	2.01	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 4.977.720.484	Rp 4.380.162.430,00	40,03	Rp597.558.054
1	0 2	0 2	2.01	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	Rp 520.474.900	Rp 483.946.224,00	0,00	Rp36.528.676
1	0 2	0 2	2.01	1 9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000,00		Rp0
1	0 2	0 2	2.01	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 69.186.000	Rp 54.887.950,00	0,00	Rp14.298.050
1	0 2	0 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.387.141.740	Rp 34.313.053.593,00	65,48	Rp3.074.088.147
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 175.359.850	Rp 144.130.380,00	32,34	Rp31.229.470
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 64.635.000	Rp 56.971.750,00	74,51	Rp7.663.250
1	0 2	0 2	2.02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Rp 14.999.770	Rp 14.724.650,00	100,00	Rp275.120
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 10.000.000	Rp 9.552.000,00	65,46	Rp448.000
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 15.000.000	Rp 14.800.700,00	57,33	Rp199.300
1	0 2	0 2	2.02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 10.000.000	Rp 9.932.000,00	99,32	Rp68.000
1	0 2	0 2	2.02	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 14.999.700	Rp 14.887.700,00	100,00	Rp112.000
1	0 2	0 2	2.02	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 69.401.100	Rp 68.705.100,00	97,85	Rp696.000
1	0 2	0 2	2.02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 10.000.000	Rp 9.646.000,00	99,70	Rp354.000
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 45.280.000	Rp 44.000.000,00	91,33	Rp1.280.000
1	0 2	0 2	2.02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 32.891.900	Rp 26.358.000,00	56,33	Rp6.533.900
1	0 2	0 2	2.02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 180.330.500	Rp 166.828.212,00	37,80	Rp13.502.288
1	1	0 2	2.02	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp 3.203.853.300	Rp 1.306.789.050,00	25,81	Rp1.897.064.250

1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 606.998.100	Rp 528.983.650,00	67,67	Rp78.014.450
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 30.114.750	Rp 27.267.850,00	78,32	Rp2.846.900
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 784.982.670	Rp 750.709.200,00	87,78	Rp34.273.470
1	0 2	1 8	2.02		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 10.000.000	Rp 9.988.000,00	22,00	Rp12.000
1	0 2	0 2	2.02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp 24.192.000	Rp 24.047.000,00	98,76	Rp145.000
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 12.432.000	Rp 12.104.000,00	97,36	Rp328.000
1	0 2	0 2	2.02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 5.000.000	Rp 4.504.000,00	90,08	Rp496.000
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 10.000.000	Rp 9.994.000,00	99,94	Rp6.000
1	0 2	0 2	2.02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 55.280.000	Rp 50.054.000,00	91,25	Rp5.226.000
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 140.218.000	Rp 114.296.800,00	72,96	Rp25.921.200
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 22.534.504.000	Rp 22.036.778.351,00	71,36	Rp497.725.649
1	0 2	0 2	2.02	2 7	Deteksi Dini Fasyankes dan Sekolah	Rp 5.000.000	Rp 4.840.000,00	96,80	Rp160.000
1	0 2	0 2	2.02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp 160.909.100	Rp 152.713.265,00	51,64	Rp8.195.835
8	0 2	0 2	2.02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 3.000.000.000	Rp 2.809.712.915,00	35,15	Rp190.287.085
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 5.200.000.000	Rp 5.056.464.300,00	75,06	Rp143.535.700
1	0 2	0 2	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 111.420.000	Rp -	0,00	Rp111.420.000
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 99.340.000	Rp 84.368.720,00	84,93	Rp14.971.280
1	0 2	0 2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 236.899.760	Rp 234.646.760,00	3,64	Rp2.253.000

1	0 2	0 2	2.03	0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp 11.899.760	Rp 11.899.760,00	16,57	Rp0
1	0 2	0 2	2.03	0 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 10.000.000	Rp 9.072.000,00	66,52	Rp928.000
1	0 2	0 2	2.03	0 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Dinas Kesehatan)	Rp 215.000.000	Rp 213.675.000,00	0,00	Rp1.325.000
1	0 2	0 2	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 112.068.750	Rp 90.418.950,00	70,75	Rp21.649.800
1	0 2	0 2	2.04	0 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 9.747.000,00	68,10	Rp253.000
1	0 2	0 2	2.04	0 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 84.069.000	Rp 64.947.950,00	77,26	Rp19.121.050
1	0 2	0 2	2.04	0 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp 17.999.750	Rp 15.724.000,00	41,81	Rp2.275.750
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 10.709.458.916	Rp 10.542.045.454,00	77,00	Rp167.413.462
1	0 2	0 3	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 13.630.000	Rp 13.418.000,00	100,00	Rp212.000
1	0 2	0 3	2.01	0 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 13.630.000	Rp 13.418.000,00	100,00	Rp212.000
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 10.665.438.866	Rp 10.498.292.404,00	77,11	Rp167.146.462
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 10.587.175.016	Rp 10.430.350.793,00	77,36	Rp156.824.223
1	0 2	0 3	2.02	0 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 78.263.850	Rp 67.941.611,00	43,31	Rp10.322.239
1	0 2	0 3	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.390.050	Rp 30.335.050,00	28,30	Rp55.000
1	0 2	0 3	2.03	0 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.390.050	Rp 30.335.050,00	28,30	Rp55.000
1	0 2	0 4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 49.053.230	Rp 48.499.800,00	96,34	Rp553.430
1	0 2	0 4	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 17.459.800	Rp 17.350.800,00	92,27	Rp109.000
1	0 2	0 4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Rp 17.459.800	Rp 17.350.800,00	92,27	Rp109.000
1	0 2	0 4	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 11.699.430	Rp 11.553.000,00	98,75	Rp146.430

1	0 2	0 4	2.03	0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 11.699.430	Rp 11.553.000,00	98,75	Rp146.430
1	0 2	0 4	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp 19.894.000	Rp 19.596.000,00	98,50	Rp298.000
1	0 2	0 4	2.06	0 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp 9.864.000	Rp 9.662.000,00	97,95	Rp202.000
1	0 2	0 4	2.06	0 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Rp 10.030.000	Rp 9.934.000,00	99,04	Rp96.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 80.710.250	Rp 79.515.900,00	67,17	Rp1.194.350
1	2	5	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.710.250	Rp 59.665.900,00	62,70	Rp1.044.350
1	0 2	0 5	2.01	0 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 60.710.250	Rp 59.665.900,00	62,70	Rp1.044.350
1	2	5	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 9.914.000,00	88,94	Rp86.000
1	0 2	0 5	2.02	0 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 10.000.000	Rp 11.000.000,00	88,94	-Rp1.000.000
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 9.936.000,00	72,57	Rp64.000
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 10.000.000	Rp 9.936.000,00	72,57	Rp64.000
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						Rp 3.601.233.950	Rp 3.376.692.776,00	96,02	Rp224.541.174
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 3.352.582.550	Rp 3.150.940.082,00	97,74	Rp201.642.468
1	0 2	0 2	2,01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.238.136.350	Rp 3.045.295.645,00	98,04	Rp192.840.705

1	0 2	0 2	2.01	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunpebg Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 2.601.233.950	Rp 2.444.280.680,00	100,00	Rp156.953.270
1	0 2	0 2	2.01	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	Rp 601.380.600	Rp 569.353.945,00	90,80	Rp32.026.655
1	0 2	0 2	2.01	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunpebg Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 35.521.800	Rp 31.661.020,00	76,97	Rp3.860.780
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 114.446.200	Rp 105.644.437,00	89,24	Rp8.801.763
1	0 2	0 2	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 114.446.200	Rp 105.644.437,00	89,24	Rp8.801.763
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 248.651.400	Rp 225.752.694,00	72,84	Rp22.898.706
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 248.651.400	Rp 225.752.694,00	72,84	Rp22.898.706
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 248.651.400	Rp 225.752.694,00	72,84	Rp22.898.706
PUSKESMAS ARUT SELATAN						Rp 1.878.093.250	Rp 1.570.481.750,00	70,30	Rp307.611.500
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.732.680.450	Rp 1.425.068.950,00	71,39	Rp307.611.500
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.732.680.450	Rp 1.425.068.950,00	71,39	Rp307.611.500
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 33.270.000	Rp 33.270.000,00	93,33	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 4.650.000	Rp 4.650.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 3					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 2.200.000			Rp2.200.000
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 51.605.000	Rp 36.820.000,00	60,47	Rp14.785.000
1	0 2	0 2	2.02	0 6					Rp0

1	0 2	0 2	2.02	0 7					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 8					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 2					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Rp 41.750.000	Rp 39.800.000,00	68,98	Rp1.950.000
1	0 2	0 2	2.02	1 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 26.700.000	Rp 26.700.000,00	76,03	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 50.080.000	Rp 50.080.000,00	92,75	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 36.170.000	Rp 34.090.000,00	64,97	Rp2.080.000
1	0 2	0 2	2.02	1 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 16.779.950	Rp 16.779.950,00	55,42	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 3					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 117.165.050	Rp 117.165.050,00	76,74	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 1.156.536.000	Rp 867.739.500,00	75,03	Rp288.796.500
1	0 2	0 2	2.02	2 7					Rp0

1	0 2	0 2	2.02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 600.000	Rp 600.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 0					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 2					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 192.774.450	Rp 192.774.450,00	41,63	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000,00	0,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 144.112.800,00	57,81	Rp0
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 144.112.800,00	57,81	Rp0
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 144.112.800,00	57,81	Rp0
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000,00	0,00	Rp0

1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000,00	0,00	Rp0
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000,00	0,00	Rp0
PUSKESMAS MADUREJO						Rp 1.628.030.550	Rp 1.461.587.072,00	77,73	Rp166.443.478
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.483.419.950	Rp 1.348.259.820,00	78,22	Rp135.160.130
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.483.419.950	Rp 1.348.259.820,00	78,22	Rp135.160.130
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 81.900.000	Rp 80.350.000,00	84,43	Rp1.550.000
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 6.000.000	Rp 5.900.000,00	89,17	Rp100.000
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 49.140.000	Rp 49.040.000,00	79,12	Rp100.000
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Rp 92.700.000	Rp 90.500.000,00	91,91	Rp2.200.000

									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 54.540.000	Rp 50.490.000,00	92,30	Rp4.050.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 5.000.000	Rp 4.400.000,00	88,00	Rp600.000
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 18.900.000	Rp 18.300.000,00	85,40	Rp600.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 64.400.000	Rp 46.400.000,00	62,81	Rp18.000.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 14.600.000	Rp 4.700.000,00	26,71	Rp9.900.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 2.400.000	Rp 500.000,00	20,83	Rp1.900.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 137.800.000	Rp 109.050.000,00	66,84	Rp28.750.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 738.078.000	Rp 697.427.870,00	84,57	Rp40.650.130
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Rp -	#DIV/0!	Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 215.561.950	Rp 190.801.950,00	59,96	Rp24.760.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 2.400.000	Rp 400.000,00	16,67	Rp2.000.000
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	0 2	0 2	2.02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 1.400.000	Rp 500.000,00	114,29	Rp900.000
1	0 2	0 2	2.02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 5.400.000	Rp 4.940.000,00	91,11	Rp460.000
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 44.570.000	Rp 26.590.000,00	59,66	Rp17.980.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 33.650.000	Rp 32.160.000,00	86,86	Rp1.490.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 17.800.000	Rp 13.150.000,00	66,35	Rp4.650.000
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 39.990.000	Rp 27.870.000,00	67,74	Rp12.120.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 69.800.000	Rp 32.530.000,00	43,12	Rp37.270.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 1.800.000	Rp 600.000,00	33,33	Rp1.200.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 7.440.000	Rp 7.390.000,00	89,25	Rp50.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 143.315.000	Rp 94.845.000,00	51,53	Rp48.470.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 338.400.000	Rp 276.738.756,00	76,15	Rp61.661.244
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 103.950.000	Rp 85.493.000,00	40,99	Rp18.457.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 8.600.000	Rp 3.740.000,00	69,65	Rp4.860.000

								Rp0	
1	0 2	0 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 142.444.037,00	89,63	Rp1.668.763	
1	0 2	0 3	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 142.444.037,00	89,63	Rp1.668.763	
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 142.444.037,00	89,63	Rp1.668.763
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 7.500.000	Rp 5.940.000,00	80,93	Rp1.560.000	
1	2	5	2,03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.500.000	Rp 5.940.000,00	80,93	Rp1.560.000	
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 7.500.000	Rp 5.940.000,00	80,93	Rp1.560.000
PUSKESMAS RUNTU					Rp 845.438.750	Rp 789.611.488,00	72,64	Rp55.827.262	
1	0 2	0 2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 692.145.950	Rp 641.963.153,00	72,64	Rp50.182.797	
1	0 2	0 2	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 692.145.950	Rp 641.963.153,00	72,64	Rp50.182.797	
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 35.300.000	Rp 33.080.000,00	92,35	Rp2.220.000
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000,00	84,65	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Rp 3.960.000	Rp 3.400.000,00	100,00	Rp560.000
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 9.940.000	Rp 9.940.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 36.260.000	Rp 33.160.000,00	94,24	Rp3.100.000
								Rp0	
								Rp0	
								Rp0	
								Rp0	
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 6.580.000	Rp 6.570.000,00	94,38	Rp10.000
								Rp0	
								Rp0	

1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 53.540.000	Rp 52.420.000,00	70,79	Rp1.120.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 30.050.000	Rp 29.710.000,00	96,17	Rp340.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 13.680.000	Rp 12.300.000,00	75,22	Rp1.380.000
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 43.380.000	Rp 43.380.000,00	97,19	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 46.200.000	Rp 46.180.000,00	96,19	Rp20.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 10.900.000	Rp 10.900.000,00	100,00	Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 2.760.000	Rp 2.760.000,00	100,00	Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 101.640.000	Rp 95.490.000,00	100,00	Rp6.150.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 115.128.000	Rp 112.532.497,00	22,60	Rp2.595.503
1	0 2	0 2	2.02	2 7		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 8.920.000	Rp -	50,00	Rp8.920.000
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 160.627.950	Rp 136.860.656,00	58,90	Rp23.767.294
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 2.260.000	Rp 2.260.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000,00	100,00	Rp0

1	0 2	0 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 138.468.335,00	87,78	Rp5.644.465	
1	0 2	0 3	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 138.468.335,00	87,78	Rp5.644.465	
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 138.468.335,00	87,78	Rp5.644.465
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 9.180.000	Rp 9.180.000,00	100,00	Rp0	
1	2	5	2,03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.180.000	Rp 9.180.000,00	100,00	Rp0	
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 9.180.000	Rp 9.180.000,00	100,00	Rp0
PUSKESMAS KUMAI					Rp 2.566.189.500	Rp 2.347.125.967,00	72,42	Rp219.063.533	
1	0 2	0 2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 2.422.076.700	Rp 2.251.050.767,00	72,42	Rp171.025.933	
1	0 2	0 2	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.422.076.700	Rp 2.251.050.767,00	72,42	Rp171.025.933	
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 55.800.000	Rp 55.800.000,00	94,89	Rp0
								Rp0	
1	0 2	0 2	2.02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 10.140.000	Rp 10.010.000,00	50,39	Rp130.000
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000,00	63,58	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 72.440.000	Rp 72.440.000,00	64,94	Rp0
								Rp0	
								Rp0	
								Rp0	
								Rp0	
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 24.880.000	Rp 24.820.000,00	84,49	Rp60.000
								Rp0	
								Rp0	
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).	Rp 71.320.000	Rp 68.270.000,00	95,01	Rp3.050.000

									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 84.260.000	Rp 84.260.000,00	31,18	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000,00	0,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 29.260.000	Rp 29.130.000,00	76,45	Rp130.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 23.000.000	Rp 22.750.000,00	70,65	Rp250.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 16.440.000	Rp 16.440.000,00	0,00	Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 10.790.000	Rp 10.420.000,00	84,52	Rp370.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 319.849.250	Rp 319.849.250,00	56,30	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 1.621.296.000	Rp 1.454.713.136,00	78,42	Rp166.582.864
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 43.001.450	Rp 42.548.381,00	32,56	Rp453.069
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00	0,00	Rp0
									Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 96.075.200,00	91,67	Rp48.037.600

1	0 2	0 3	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 96.075.200,00	91,67	Rp48.037.600
1	0 2	0 3	2.02 0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 144.112.800,00	91,67	Rp0
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Rp0
1	2	5	2,03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp0
1	0 2	0 5	2.03 0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Rp0
PUSKESMAS TELUK BOGAM					Rp 958.523.700	Rp 889.284.745,00	86,08	Rp69.238.955
1	0 2	0 2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 771.920.900	Rp 755.431.910,00	86,08	Rp16.488.990
1	0 2	0 2	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 771.920.900	Rp 755.431.910,00	86,08	Rp16.488.990
1	0 2	0 2	2.02 0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 32.685.000	Rp 32.665.000,00	94,00	Rp20.000
1	0 2	0 2	2.02 0 2		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Rp 1.260.000	Rp -	0,00	Rp1.260.000
1	0 2	0 2	2.02 0 4		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 17.600.000	Rp 17.585.000,00	99,91	Rp15.000
1	0 2	0 2	2.02 0 6		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 0 7		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 0 8		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 0 9		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 2.050.000	Rp 2.030.000,00	96,59	Rp20.000
1	0 2	0 2	2.02 1 1		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 1 2		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02 1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 51.910.000	Rp 50.750.000,00	97,05	Rp1.160.000

1	1	0 2	2.02	1 4		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 14.720.000	Rp 14.720.000,00	97,25	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 4.010.000	Rp 4.010.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 29.400.000	Rp 29.400.000,00	97,94	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 68.734.000	Rp 68.550.000,00	72,06	Rp184.000
1	0 2	0 2	2.02	1 9		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans KesehataN	Rp 320.000	Rp 320.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 1		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 4.430.000	Rp 4.430.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 3		Rp -			Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 80.641.900	Rp 76.160.000,00	89,40	Rp4.481.900
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakatan	Rp 183.480.000	Rp 176.349.940,00	85,10	Rp7.130.060
1	0 2	0 2	2.02	2 7		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 3.270.000	Rp 1.150.000,00	32,72	Rp2.120.000
1	0 2	0 2	2.02	2 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 0		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 1		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 2		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 270.190.000	Rp 270.091.970,00	83,76	Rp98.030
1	0 2	0 2	2.02	3 4		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5		Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 7.220.000	Rp 7.220.000,00	94,32	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 7		Rp -			Rp0

1	0 2	0 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 133.852.835,00	76,36	Rp10.259.965	
1	0 2	0 3	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 133.852.835,00	76,36	Rp10.259.965	
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 133.852.835,00	76,36	Rp10.259.965
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 42.490.000	Rp -	94,56	Rp42.490.000	
1	2	5	2,03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.490.000	Rp -	94,56	Rp42.490.000	
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 42.490.000	Rp 42.490.000,00	94,56	Rp0
PUSKESMAS SUNGAI RANGIT					Rp 1.561.560.150	Rp 1.499.524.208,00	83,54	Rp62.035.942	
1	0 2	0 2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.452.953.550	Rp 1.393.524.208,00	83,54	Rp59.429.342	
1	0 2	0 2	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.452.953.550	Rp 1.393.524.208,00	83,54	Rp59.429.342	
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 30.777.460	Rp 30.440.000,00	84,51	Rp337.460
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 15.300.000	Rp 15.295.000,00	71,90	Rp5.000
1	0 2	0 2	2.02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Rp 13.090.000	Rp 13.020.000,00	74,71	Rp70.000
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 28.440.000	Rp 28.020.000,00	80,49	Rp420.000
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 39.120.000	Rp 39.120.000,00	92,78	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 6		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 7		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 8		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0

1	0 2	0 2	2.02	0 9		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 1		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 2		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
2	0 3	0 3	2.03	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Rp 54.407.700			Rp54.407.700
1	1 2	0 2	2.02	1 4		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 61.200.000	Rp 60.985.000,00	93,30	Rp215.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 17.610.100	Rp 17.595.000,00	96,76	Rp15.100
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 21.620.000	Rp 21.610.000,00	96,99	Rp10.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 46.210.000	Rp 46.210.000,00	88,71	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 9		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 6.480.000	Rp 6.480.000,00	86,57	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 1		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 16.556.000	Rp 16.520.000,00	98,57	Rp36.000
1	0 2	0 2	2.02	2 3		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 193.594.676	Rp 193.594.500,00	90,82	Rp176
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 769.176.000	Rp 723.299.708,00	85,91	Rp45.876.292
1	0 2	0 2	2.02	2 7		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 9		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
									Rp0
									Rp0
,	0 2	0 2	2.02	3 2			Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 136.311.614	Rp 134.160.000,00	71,83	Rp2.151.614

1	0 2	0 2	2.02	3 4		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
2	0 3	0 3	2.03	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 3.060.000			Rp3.060.000
1	0 2	0 2	2.02	3 7		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 108.606.600	Rp 106.000.000,00	91,67	Rp2.606.600
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 108.606.600	Rp 106.000.000,00	91,67	Rp2.606.600
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 108.606.600	Rp 106.000.000,00	91,67	Rp2.606.600
									Rp0
									Rp0
									Rp0
PUSKESMAS PANGKALAN LADA						Rp 970.409.800	Rp 868.394.702,00	73,75	Rp102.015.098
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 817.577.000	Rp 719.613.467,00	73,75	Rp97.963.533
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 817.577.000	Rp 719.613.467,00	73,75	Rp97.963.533
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 20.220.000	Rp 20.220.000,00	90,36	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 42.240.000	Rp 42.240.000,00	96,33	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 3					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 24.110.000	Rp 24.110.000,00	73,66	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 6					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 7					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 8					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 9					Rp0

1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 2					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KejadianLuar Biasa (KLB	Rp 56.580.000	Rp 56.580.000,00	88,51	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 35.340.000	Rp 35.340.000,00	88,71	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 5.800.000	Rp 5.800.000,00	91,55	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 17.160.000	Rp 17.160.000,00	93,59	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 23.270.000	Rp 23.270.000,00	63,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 440.000	Rp 440.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 3					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 117.600.000	Rp 110.100.000,00	91,55	Rp7.500.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 305.208.000	Rp 233.135.824,00	72,06	Rp72.072.176
1	0 2	0 2	2.02	2 7					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 0					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 2					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 163.049.000	Rp 144.657.643,00	45,65	Rp18.391.357

1	0 2	0 2	2.02	3 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 2.160.000	Rp 2.160.000,00	88,89	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 7		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 140.063.235,00	88,46	Rp4.049.565
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 140.063.235,00	88,46	Rp4.049.565
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 140.063.235,00	88,46	Rp4.049.565
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 8.720.000	Rp 8.718.000,00	99,79	Rp2.000
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.720.000	Rp 8.718.000,00	99,79	Rp2.000
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 8.720.000	Rp 8.718.000,00	99,79	Rp2.000
PUSKESMAS PANDU SENJAYA						Rp 1.003.409.000	Rp 925.387.817,00	73,98	Rp78.021.183
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 859.296.200	Rp 787.200.973,00	73,98	Rp72.095.227
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 859.296.200	Rp 787.200.973,00	73,98	Rp72.095.227
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 57.120.000	Rp 45.645.000,00	65,61	Rp11.475.000
2	0 3	0 3	2.03	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 32.300.000	Rp 31.535.000,00	83,16	Rp765.000

3	0 4	0 4	2.04	0 3					Rp0
4	0 5	0 5	2.05	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 6.120.000	Rp 6.120.000,00	100,00	Rp0
5	0 6	0 6	2.06	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 19.380.000	Rp 18.190.000,00	88,60	Rp1.190.000
6	0 7	0 7	2.07	0 6					Rp0
7	0 8	0 8	2.08	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 30.600.000	Rp 30.600.000,00	83,33	Rp0
8	0 9	0 9	2.09	0 8					Rp0
9	1 0	1 0	2.10	0 9					Rp0
10	1 1	1 1	2.11	1 0					Rp0
11	1 2	1 2	2.12	1 1					Rp0
12	1 3	1 3	2.13	1 2					Rp0
13	1 4	1 4	2.14	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 33.186.200	Rp 33.186.200,00	68,31	Rp0
14	1 5	1 5	2.15	1 4					Rp0
15	1 6	1 6	2.16	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 70.040.000	Rp 67.150.000,00	78,64	Rp2.890.000
16	1 7	1 7	2.17	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 21.420.000	Rp 6.290.000,00	22,62	Rp15.130.000
17	1 8	1 8	2.18	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 9.520.000	Rp 7.820.000,00	58,93	Rp1.700.000
18	1 9	1 9	2.19	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 21.420.000	Rp 18.955.000,00	88,49	Rp2.465.000
19	2 0	2 0	2.20	1 9					Rp0
20	2 1	2 1	2.21	2 0					Rp0
21	2 2	2 2	2.22	2 1					Rp0
22	2 3	2 3	2.23	2 2					Rp0
23	2 4	2 4	2.24	2 3					Rp0
24	2 5	2 5	2.25	2 4					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 131.070.000	Rp 113.135.000,00	68,09	Rp17.935.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 319.800.000	Rp 308.779.700,00	91,97	Rp11.020.300

2	0 3	0 3	2.03	2 7					Rp0
3	0 4	0 4	2.04	2 8					Rp0
4	0 5	0 5	2.05	2 9					Rp0
5	0 6	0 6	2.06	3 0					Rp0
6	0 7	0 7	2.07	3 1					Rp0
7	0 8	0 8	2.08	3 2					Rp0
8	0 9	0 9	2.09	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 107.320.000	Rp 99.795.073,00	14,35	Rp7.524.927
9	1 0	1 0	2.10	3 4					Rp0
10	1 1	1 1	2.11	3 5					Rp0
11	1 2	1 2	2.12	3 6					Rp0
12	1 3	1 3	2.13	3 7					Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 138.186.844,00	80,05	Rp5.925.956
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 138.186.844,00	80,05	Rp5.925.956
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 138.186.844,00	80,05	Rp5.925.956
									Rp0
									Rp0
									Rp0
PUSKESMAS SEMANGGANG						Rp 1.466.880.800	Rp 1.421.100.777,00	89,35	Rp45.780.023
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.320.268.000	Rp 1.280.369.177,00	89,35	Rp39.898.823
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.320.268.000	Rp 1.280.369.177,00	89,35	Rp39.898.823
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 83.640.000	Rp 83.555.000,00	88,99	Rp85.000
1	0	0	2.02	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Rp0

	2	2	2					
1	0 2	0 2	2.02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 19.550.000	Rp 18.615.000,00	94,50 Rp935.000
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 30.175.000	Rp 30.005.000,00	91,27 Rp170.000
1	0 2	0 2	2.02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 13.600.000	Rp 13.345.000,00	98,46 Rp255.000
1	0 2	0 2	2.02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Rp0
1	2	2	02.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 95.515.000	Rp 95.345.000,00	100,00 Rp170.000
1	1	0 2	2.02	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 34.850.000	Rp 33.830.000,00	91,59 Rp1.020.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 2.550.000	Rp 1.700.000,00	83,33 Rp850.000
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 18.870.000	Rp 17.340.000,00	92,58 Rp1.530.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 7.650.000	Rp 7.565.000,00	95,75 Rp85.000
1	0 2	0 2	2.02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000,00	92,89 Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Rp0
								Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 275.655.000	Rp 275.145.000,00	92,91 Rp510.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 659.808.000	Rp 591.204.253,00	86,76 Rp68.603.747

1	0 2	0 2	2.02	2 7	Deteksi Dini Fasyankes dan Sekolah				Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				Rp0
									Rp0
									Rp0
	0 2	0 2	2.02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 48.825.000	Rp 48.424.924,00	71,81	Rp400.076
1	0 2	0 2	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				Rp0
1	2 2	2 2	02.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat massal	Rp 9.180.000	Rp 8.245.000,00	96,30	Rp935.000
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 143.212.800	Rp 137.331.600,00	72,97	Rp5.881.200
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 143.212.800	Rp 137.331.600,00	72,97	Rp5.881.200
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 143.212.800	Rp 137.331.600,00	72,97	Rp5.881.200
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 3.400.000	Rp 3.400.000,00	100,00	Rp0
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.400.000	Rp 3.400.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 3.400.000	Rp 3.400.000,00	100,00	Rp0
PUSKESMAS KARANG MULYA						Rp 1.346.542.800	Rp 1.161.950.152,00	74,97	Rp184.592.648
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.191.070.000	Rp 1.020.990.053,00	74,97	Rp170.079.947
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.191.070.000	Rp 1.020.990.053,00	74,97	Rp170.079.947

1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 95.000.000	Rp 84.200.000,00	72,80	Rp10.800.000
1	0 2	0 2	2.02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 1.920.000	Rp -	0,00	Rp1.920.000
1	0 2	0 2	2.02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 19.380.000	Rp 18.980.000,00	113,31	Rp400.000
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 6					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 7					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 8					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0		Rp -			Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 68.650.000	Rp -	0,00	Rp68.650.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 37.680.000	Rp 37.640.000,00	69,27	Rp40.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 5.620.000	Rp 4.580.000,00	80,60	Rp1.040.000
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 19.760.000	Rp 19.740.000,00	77,73	Rp20.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 64.870.000	Rp 64.820.000,00	99,92	Rp50.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 6.080.000	Rp -	0,00	Rp6.080.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 33.680.000	Rp 33.440.000,00	105,61	Rp240.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 183.460.000	Rp 183.710.000,00	109,42	-Rp250.000

1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 526.560.000	Rp 498.980.053,00	80,17	Rp27.579.947
						Rp -	#DIV/0!	Rp0	
1	0 2	0 2	2.02	2 7	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp -			Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 9					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 0					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 1					Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 123.330.000	Rp 72.980.000,00	26,45	Rp50.350.000
1	0 2	0 2	2.02	3 4			Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5			Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 2.640.000	Rp -	0,00	Rp2.640.000
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 2.440.000	Rp 1.920.000,00	0,00	Rp520.000
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 131.860.099,00	83,88	Rp12.252.701
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 131.860.099,00	83,88	Rp12.252.701
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 131.860.099,00	83,88	Rp12.252.701
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 11.360.000	Rp 9.100.000,00	79,23	Rp2.260.000
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.360.000	Rp 9.100.000,00	79,23	Rp2.260.000
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 11.360.000	Rp 9.100.000,00	79,23	Rp2.260.000

[illegible]

1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000,00	90,91	Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 154.700.000	Rp 154.700.000,00	96,51	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 140.820.000	Rp 127.582.580,00	72,44	Rp13.237.420
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 142.455.700	Rp 134.538.212,00	59,85	Rp7.917.488
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 6.600.000	Rp 6.600.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 138.924.935,00	87,60	Rp5.187.865
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 138.924.935,00	87,60	Rp5.187.865
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 138.924.935,00	87,60	Rp5.187.865
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Rp0

1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp0
1	0 2	0 5	2,03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Rp0
PUSKESMAS SAMBI						Rp 871.448.600	Rp 751.533.897,00	51,80	Rp119.914.703
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 714.555.800	Rp 606.170.461,00	51,80	Rp108.385.339
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 714.555.800	Rp 606.170.461,00	51,80	Rp108.385.339
1	0 2	0 2	2,02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 19.350.000	Rp 19.350.000,00	0,00	Rp0
1	0 2	0 2	2,02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 8.520.000	Rp -	0,00	Rp8.520.000
1	0 2	0 2	2,02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Rp -	Rp 8.520.000,00	#DIV/0!	-Rp8.520.000
1	0 2	0 2	2,02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 8.860.000	Rp 12.780.000,00	0,00	-Rp3.920.000
1	0 2	0 2	2,02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 12.780.000	Rp -	0,00	Rp12.780.000
1	0 2	0 2	2,02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2,02	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2,02	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2,02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2,02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 4.350.000	Rp 4.345.000,00	0,00	Rp5.000
1	0 2	0 2	2,02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2,02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp -	Rp 24.000.000,00	#DIV/0!	-Rp24.000.000
1	0 2	0 2	2,02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 45.050.600	Rp -	0,00	Rp45.050.600
1	1 2	0 2	2,02	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp -	Rp 15.090.000,00	#DIV/0!	-Rp15.090.000
1	0 2	0 2	2,02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 15.090.000	Rp -	0,00	Rp15.090.000
1	0 2	0 2	2,02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp -	Rp 48.605.000,00	#DIV/0!	-Rp48.605.000
1	0	0	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp	Rp	0,00	-Rp9.460.000

	2	2	7			48.630.000	58.090.000,00		
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 58.095.000	Rp -	0,00	Rp58.095.000
1	0 2	0 2	2.02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp -	Rp 20.275.000,00	#DIV/0!	-Rp20.275.000
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 20.275.000	Rp -	0,00	Rp20.275.000
1	0 2	0 2	2.02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 4			Rp 151.195.000,00	#DIV/0!	-Rp151.195.000
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 151.195.000	Rp -	0,00	Rp151.195.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 78.408.000	Rp -	0,00	Rp78.408.000
1	0 2	0 2	2.02	2 7	Deteksi Dini Fasyankes dan Sekolah	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8		Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 0			Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 1			Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp -	Rp 223.995.461,00	#DIV/0!	-Rp223.995.461
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 224.022.200	Rp -	0,00	Rp224.022.200
1	0 2	0 2	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 19.925.000,00	#DIV/0!	-Rp19.925.000
1	0 2	0 2	2.02	3 6		Rp 19.930.000	Rp -	0,00	Rp19.930.000
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp -	Rp 134.713.436,00	#DIV/0!	-Rp134.713.436
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 134.713.436,00	76,96	Rp9.399.364

1	0 2	0 3	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 134.713.436,00	76,96	Rp9.399.364	
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 10.650.000,00	0,00	Rp133.462.800
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 12.780.000	Rp 10.650.000,00	66,67	Rp2.130.000
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.780.000	Rp 10.650.000,00	66,67	Rp2.130.000
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 12.780.000		0,00	Rp12.780.000
PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA						Rp 1.200.493.800	Rp 835.328.320,00	59,51	Rp365.165.480
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.049.631.000	Rp 731.573.320,00	59,51	Rp318.057.680
1	0 2	0 2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.049.631.000	Rp 731.573.320,00	59,51	Rp318.057.680
1	0 2	0 2	2.02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 33.950.000	Rp 33.950.000,00	87,36	Rp0
2	0 3	0 3	2.03	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			#DIV/0!	Rp0
3	0 4	0 4	2.04	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir			#DIV/0!	Rp0
4	0 5	0 5	2.05	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 25.870.000	Rp 9.710.000,00	31,81	Rp16.160.000
2	0 3	0 3	2.03	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			#DIV/0!	Rp0
3	0 4	0 4	2.04	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			#DIV/0!	Rp0
4	0 5	0 5	2.05	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			#DIV/0!	Rp0
5	0 6	0 6	2.06	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 7.170.000	Rp 3.935.000,00	39,82	Rp3.235.000
2	0 3	0 3	2.03	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			#DIV/0!	Rp0
3	0	0	2.04	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			#DIV/0!	Rp0

	4	4	2						
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Rp 72.495.000	Rp 11.590.000,00	17,95	Rp60.905.000
2	0 3	0 3	2.03	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 56.120.000	Rp 37.335.000,00	55,59	Rp18.785.000
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 11.825.000	Rp 4.995.000,00	42,24	Rp6.830.000
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 60.300.000	Rp 10.780.000,00	16,09	Rp49.520.000
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 29.400.000	Rp 29.375.000,00	96,21	Rp25.000
2	0 3	0 3	2.03	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 23.490.000	Rp 12.565.000,00	53,49	Rp10.925.000
2	0 3	0 3	2.03	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 8.855.000	Rp 2.485.000,00	40,09	Rp6.370.000
2	0 3	0 3	2.03	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			#DIV/0!	Rp0
3	0 4	0 4	2.04	2 4				#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 174.715.000	Rp 158.720.000,00	73,13	Rp15.995.000
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 405.936.000	Rp 366.013.320,00	80,96	Rp39.922.680
2	0 3	0 3	2.03	2 7	Deteksi Dini Fasyankes dan Sekolah			#DIV/0!	Rp0
3	0 4	0 4	2.04	2 8				#DIV/0!	Rp0
4	0 5	0 5	2.05	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			#DIV/0!	Rp0
5	0 6	0 6	2.06	3 0				#DIV/0!	Rp0
6	0 7	0 7	2.07	3 1				#DIV/0!	Rp0
7	0 8	0 8	2.08	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			#DIV/0!	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 116.670.000	Rp 41.225.000,00	14,75	Rp75.445.000
2	0 3	0 3	2.03	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			#DIV/0!	Rp0
3	0 4	0 4	2.04	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			#DIV/0!	Rp0
1	0	0	2.02	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Rp	Rp	30,37	Rp13.940.000

[illegible]

[illegible]

									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 5.730.000	Rp 5.730.000,00	89,09	Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 46.995.000	Rp 36.055.000,00	73,39	Rp10.940.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 42.480.000	Rp 42.480.000,00	94,28	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 8.260.000	Rp 8.260.000,00	94,25	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 32.740.000	Rp 32.740.000,00	96,82	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 17.780.000	Rp 17.780.000,00	92,15	Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 20.800.000	Rp 18.520.000,00	79,23	Rp2.280.000
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 8.290.000	Rp 7.480.000,00	78,05	Rp810.000
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 149.533.830	Rp 148.915.000,00	84,90	Rp618.830
1	0 2	0 2	2.02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 73.260.000	Rp 60.968.455,00	83,22	Rp12.291.545
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 1.660.000	Rp 1.660.000,00	93,98	Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 133.567.970	Rp 112.375.808,00	51,16	Rp21.192.162

									Rp0
									Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 4.130.000	Rp 4.130.000,00	92,86	Rp0
1	0 2	0 2	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 3.540.000	Rp 3.540.000,00	86,16	Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 144.112.800	Rp 127.531.728,00	80,21	Rp16.581.072
1	0 2	0 3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 144.112.800	Rp 127.531.728,00	80,21	Rp16.581.072
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 144.112.800	Rp 127.531.728,00	80,21	Rp16.581.072
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 1.770.000	Rp 885.000,00	100,00	Rp885.000
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.770.000	Rp 885.000,00	100,00	Rp885.000
1	0 2	0 5	2.03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 1.770.000	Rp 885.000,00	100,00	Rp885.000
INSTALASI FARMASI KABUPATEN						Rp 3.759.977.000	Rp 3.152.120.259,00	61,01	Rp607.856.741
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 3.646.149.200	Rp 3.058.062.863,00	61,01	Rp588.086.337
1	0 2	0 2	2,01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.439.752.603	Rp 2.863.783.813,00	61,49	Rp575.968.790
1	0 2	0 2	2.01	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Rp 1.905.553.000	Rp 1.341.342.443,00	36,60	Rp564.210.557
1	0 2	0 2	2.01	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	Rp 1.304.549.448	Rp 1.295.970.170,00	96,53	Rp8.579.278

1	0 2	0 2	2.01	1 9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 60.632.200	Rp 60.632.200,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.01	2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 169.017.955	Rp 165.839.000,00	57,84	Rp3.178.955
1	0 2	0 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 198.608.597	Rp 186.491.050,00	51,24	Rp12.117.547
1	0 2	0 2	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 198.608.597	Rp 186.491.050,00	51,24	Rp12.117.547
1	0 2	0 2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 7.788.000	Rp 7.788.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 2	2.03	0 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Dinas Kesehatan)	Rp 7.788.000	Rp 7.788.000,00	100,00	Rp0
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 113.827.800	Rp 94.057.396,00	63,99	Rp19.770.404
1	0 2	0 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 113.827.800	Rp 94.057.396,00	63,99	Rp19.770.404
1	0 2	0 3	2.02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 113.827.800	Rp 94.057.396,00	63,99	Rp19.770.404

TABEL 3.4 REALISASI CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target RPJMD	Realisasi Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan	Realisasi Capaian	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Perang
----	---------	------	---------------	--	--------------	-------------------	----------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------

				Urusan Pemerint ahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	(output)	Kabupaten/ kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)	Kinerja RPJMD Kabupaten/ kota sampai dengan RKPD Kabupaten/ kota Tahun Lalu (n-2)	dan Anggaran RKPD Kabupaten/k ota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	I	II	III	IV	Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupate n/kota yang Dievaluas i	dan Anggaran RPJMD Kabupate n/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksan aan RKPD tahun....)	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupate n/kota s/d Tahun ... (%)	kat Dae rah Pen ang gun g Jaw ab									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11				13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16
					K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	
	Menin gkatny a Status keseha tan keluar ga dan gizi masya rakat					160/ 100. 000 KH		120/ 100. 000 KH		100 /100. 000 KH		89,52 Per 100.00 0 KH		349P er 100.0 00 KH		347 Per 100.0 00 KH		205 Per 100. 000							
						24/1 .000 KH		20/1 .000 KH		18 / 1.00 0 KH		11,6 /1.000 KH		10,48 /100 0 KH		14,86 Per 1.000 KH		9,36 Per 100. 000							
						27%		26%		25%		7,50%		5,00 %		6,89%		4,80 %							
					Persentase desa/kelurahan siaga aktif	85%		85%		85%		60%		65,00 %		86%		86%							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan kesehatan balita	100 %		100 %		100 %		24%			44,00 %			70%			83%								
			Jumlah pemenang lomba Balita Sehat Indonesia (LBI) tingkat kabupaten	0		0		0		100%			100%			100%			0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %		100 %		100 %		15,68 %			12,70 %			75,15 %			94%								
			Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %		100 %		100 %		29%			52%			61%			65%								
			Jumlah peserta mengetahui kebijakan dan pencapaian pelayanan kesehatan lanjut usia	36 Peserta		0		0		0%			0%			0%			0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	100 %		100 %		100 %		100%			100%			100%			100 %								
			Jumlah desa/kelurahan yang melakukan STBM	94 Desa		1 Desa		1 Desa		94 Desa			94 Desa			94 Desa			94 Desa								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABEL 3.5 SPM DINAS KESEHATAN

	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN 2022	Satuan	TERLAYANI	CAPAIAN TW I	TERLAYANI	CAPAIAN TW II	TERLAYANI	CAPAIAN TW III	TERLAYANI	CAPAIAN TW IV	TOTAL TERLAYANI ORANG	TOTAL CAPAIAN S/D TW IV
					(ORANG)	(%)	(ORANG)	(%)	(ORANG)	(%)	(ORANG)	(%)	S/D TW IV	(%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	4.750	Orang	1369	28,82%	1.246	26,23%	811	17,07%	1585	33,37%	5.011	105%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan	4.534	Orang	1.119	24,68%	1.113	24,55%	1.080	23,82%	1.064	23,47%	4.376	97%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.318	Orang	1.119	25,91%	1.105	25,59%	1.045	24,20%	1.093	25,31%	4.362	101%

4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan	18.939	Orang	6.366	33,61%	4.381	23,13%	2.533	13,37%	2490	13,15%	15.770	83%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	46.948	Orang	12.354	26,31%	5.608	11,95%	27.869	59,36%	3994	8,51%	49.825	106%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan sesuai standar	180.358	Orang	25.258	14,00%	24.501	13,58%	96300	53,39%	24285	13,46%	170.344	94%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	18.468	Orang	8.215	44,48%	564	3,05%	2428	13,15%	826	4,47%	12.033	65%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53.566	Orang	3.760	7,02%	12.443	23,23%	9363	17,48%	13538	25,27%	39.104	73%

9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.591	Orang	1.230	22,00%	1.627	29,10%	1727	30,89%	1967	35,18%	6.551	117%
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	409	Orang	117	28,61%	211	51,59%	379	92,67%	393	96,09%	393	96%
11	Pelayanan kesehatan pada orang dengan Tuberkolosis (TB)	Jumlah penemuan kasus suspek teduga TBC	5.470	Orang	1.130	20,66%	935	17,09%	1.380	25,23%	1398	25,56%	4.843	89%
12	Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV -AIDS	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV - AIDS yang diperiksa	120	Orang	158	131,67%	133	110,83%	133	110,83%	148	123,33%	148	123%
13	Vaksinasi COVID -19		6.255	Orang	958	15,32%	2.208	35,30%	2.208	35,30%	1901	30,39%	7.275	116%

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan capaian indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan hingga triwulan I faktor pendorong dan penghambat pencapaian target adalah :

1. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan
- b. Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah dalam jumlah yang cukup di Puskesmas dan jaringannya.
- c. Tersedianya alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-fisik.
- d. Tersedianya kader kesehatan di seluruh Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
- e. Dukungan lintas sektor termasuk dunia usaha cukup memberikan kontribusi.

2. Faktor Penghambat

- a. Kemampuan teknis dan manajemen sumberdaya manusia (SDM) kesehatan di Puskesmas dan jaringannya belum merata.
- b. Masih terdapat Puskesmas dengan peralatan kesehatan yang belum memenuhi standar
- c. Rendahnya minat tenaga kesehatan khususnya dokter gigi bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil
- d. Kondisi Pandemi yang membatasi adanya kerumunan membuat layanan upaya kesehatan masyarakat di

Posyandu, Posbindu, Pos UKK dan UKBM lainnya terhenti atau terbatas

- e. Adanya ketakutan masyarakat tertular COVID-19 jika berada atau berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya
- f. Terlambatnya pengesahan SK PPTK

4.1 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN BERIKUTNYA

Tindak lanjut yang dapat diambil untuk meningkatkan pencapaian target di tahun 2022 antara lain :

- a. Mengendalikan COVID-19 termasuk vaksinasi COVID-19
- b. Menindaklanjuti rekomendasi Audit Maternal Perinatal untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatus
- c. Meningkatkan pembinaan Posyandu Mandiri dan UKBM Lainnya
- d. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis program ke Puskesmas.
- e. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam komunikasi, koordinasi dan pelaporan dari Puskesmas
- f. Memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- g. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan
- h. Mempertahankan keberadaan Tenaga Kontrak Daerah
- i. Mengaktifkan kunjungan rumah dengan protokol kesehatan ketat
- j. Melaksanakan pengadaan alat kesehatan di beberapa puskesmas
- k. Penataan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

BAB V

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 98,54 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 95,75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.714.389.262 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa tenaga kesehatan yang sudah terlatih dalam kompetensi tertentu berpindah tugas sehingga memerlukan proses restorasi;
- b. Kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kedaruratan KIA/PONED yang masih belum sesuai standar;
- c. Masih adanya persepsi masyarakat tentang sistem rujukan sehingga mengakibatkan masyarakat yang seharusnya dirujuk tetapi tidak mau di rujuk dan mengakibatkan kegagalan rujukan;
- d. Adanya *refocusing* anggaran menghambat kegiatan-kegiatan pelayanan SPM bidang kesehatan;
- e. Adanya persepsi masyarakat dan petugas untuk mengurangi aktivitas luar rumah.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Kesehatan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan konsolidasi dan pembinaan kepada semua fasilitas kesehatan baik pemerintah atau swasta agar mampu memberikan pelayanan yang berdampak pada peningkatan kualitas sehingga akan menurunkan resiko kematian akibat kesehatan;
- b. Dalam rangka manajemen sumber daya, kesehatan dinas kesehatan telah berusaha mendistribusi tenaga kesehatan ke seluruh faskes di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat agar memenuhi standar jenis maupun kompetensi tenaga kesehatan walaupun belum mencapai 100%;
- c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor yang terkait dengan pelayanan yg berdampak dengan peningkatan UHH.

Kerjasama yang dilakukan dengan lintas sektor yang terkait dengan peningkatan UHH diantaranya:

- a. Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Desa (PMD), diharapkan dari Dinas PMD bisa memayungi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat (UKBM) yang bersumber dari anggaran desa atau anggaran masyarakat seperti kegiatan kelas ibu hamil, posyandu aktif dan desa siaga;
- b. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan seperti kolaborasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari lama pendidikan;
- c. Meningkatkan peran CSR dalam kegiatan pelayanan kesehatan seperti dukungan dalam pelayanan di masa pandemi dan vaksinasi COVID-19;
- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara kontinu untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta pemberdayaan di masyarakat pada masa pandemi COVID-19;
- e. Peningkatan kapasitas penganggaran daerah melalui advokasi ke pemangku kebijakan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- a. Indikator sasaran yang telah memenuhi target sementara ada 6 yaitu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, prevalensi HIV, persentase desa/kelurahan dengan KLB ditangani kurang dari 24 jam, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, dan persentase penduduk miskin yang terlayani di fasilitas Kesehatan.
- b. Indikator sasaran yang memenuhi target triwulan I (berada dalam jalur pemenuhan target tahunan) ada 1 yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap
- c. Indikator yang belum memenuhi target ada 7 yaitu: Angka Kematian Ibu, persentase desa/kelurahan siaga aktif, persentase Puskesmas terakreditasi, persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai, Persentase cakupan imunisasi dasar, persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga sesuai standar dan rata-rata survey kepuasan masyarakat
- d. Realisasi fisik dan keuangan masih belum memenuhi target.

5.2 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan cakupan pemenuhan indikator sasaran sesuai target beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pemantauan bayi baru lahir dengan risiko tinggi sejak berada didalam kandungan.
2. Meningkatkan kemampuan teknis penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir bagi tenaga Puskesmas.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap SOP Rujukan
4. Meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan sesuai standar di Puskesmas
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kas.

BAB V

PENUTUP

5.3 KESIMPULAN

- e. Indikator sasaran yang telah memenuhi target sementara ada 6 yaitu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, prevalensi HIV, persentase desa/kelurahan dengan KLB ditangani kurang dari 24 jam, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, dan persentase penduduk miskin yang terlayani di fasilitas Kesehatan.
- f. Indikator sasaran yang memenuhi target triwulan I (berada dalam jalur pemenuhan target tahunan) ada 1 yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap
- g. Indikator yang belum memenuhi target ada 7 yaitu: Angka Kematian Ibu, persentase desa/kelurahan siaga aktif, persentase Puskesmas terakreditasi, persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai, Persentase cakupan imunisasi dasar, persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga sesuai standar dan rata-rata survey kepuasan masyarakat
- h. Realisasi fisik dan keuangan masih belum memenuhi target.

5.4 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan cakupan pemenuhan indikator sasaran sesuai target beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

- 6. Meningkatkan pemantauan bayi baru lahir dengan risiko tinggi sejak berada didalam kandungan.
- 7. Meningkatkan kemampuan teknis penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir bagi tenaga Puskesmas.
- 8. Meningkatkan kepatuhan terhadap SOP Rujukan
- 9. Meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan sesuai standar di Puskesmas
- 10. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kas.

